

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**(Studi pada Pemerintah Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh:

Danang Ridho Subekti
145030100111053



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTO

“SETINGGI TINGGI ILMU, SEMURNI MURNI TAUHID, SEPANDAI PANDAI SIASAT”

(H.O.S. Cokroaminoto)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Gupolo,
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)

Disusun oleh : Danang Ridho Subekti

NIM : 145030100111053

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

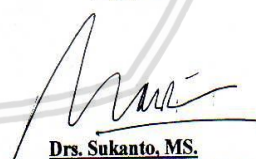
Malang, 15 Mei 2018

Komisi Pembimbing

Ketua


Drs. Heru Ribawanto, MS.
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota


Drs. Sukanto, MS.
NIP. 19591227 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 15 Mei 2018



Danang Ridho Subekti

NIM. 145030100111053

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 18 September 2018
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Danang Ridho Subekti
Judul : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

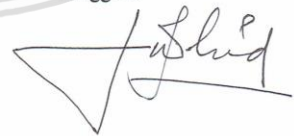

Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002


Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

Anggota

Anggota


Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001


Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada sumber semangat dalam hidup saya, Bapak Chudori. Kepada beliau yang selalu memberikan pembelajaran tentang arti hidup. Serta kepada sosok perempuan yang sangat sayangi, Ibu Titik Wahyuni. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk kakak-saya, Yunita Rahmawati, yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap sahabat-sahabat saya antara lain Defri Ardian Muhsoni, Dhita Hananda, Pebri Setyo, Mayang Ayudya, Farah Nadia, Inggit Yostiana, Ari Hendri, Rama, Prima, Vina, Risti, DLL, Juga untuk keluarga Besar Kos Kembang Kertas dan Candi Panggung, tanpa dukungan kalian semua tentu saya tidak akan mencapai tahap ini

Danang Ridho Subekti, 2018. **Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Gupolo Kabupaten Ponorogo)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Drs. Heru Ribawanto MS. 127 halaman + xv

RINGKASAN

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu indikator untuk melihat seberapa berhasilkah tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa sehingga mampu untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara benar dan terarah sesuai dengan yang telah direncanakan. Di desa Gupolo dengan jumlah alokasi dana desa yang paling kecil diantara desa lain di kecamatan Babadan efektivitas pengelolaan sangat ditekankan guna mencapai keberhasilan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di desa Gupolo, sedangkan situsnya berada di kantor desa Gupolo. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi enam tahapan yaitu 1) Perencanaan 2) Penganggaran 3) Penata usahaan 4) Pelaporan 5) Pengawasan 6) Pertanggungjawaban. Sementara itu penggunaannya dibagi menjadi empat kegiatan pemberdayaan yaitu 1) pembinaan PKK, 2) pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana, 3) pembinaan dan peningkatan kapabilitas masyarakat desa, 4) pembinaan pelaksana kegiatan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan di lapangan, peneliti berkesimpulan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan dengan efektif karena tujuan utama kegiatan pengelolaan sudah tercapai berupa terlaluinya tahapan tahapan dalam proses pengelolaan. Penggunaan alokasi dana desa juga sudah efektif berdasarkan fakta bahwa seluruh kegiatan sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya relasi dengan swasta dan keterlambatan pencairan dana

Saran dari peneliti adalah meminimalisir hambatan yang terjadi dengan membangun relasi dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kerjasama dengan akademisi untuk memecahkan masalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat di desa Gupolo.

Danang Ridho Subekti, 2018. **Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Community Empowerment (Study In Gupolo Village Ponorogo Regency)**. Essay. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya. Supervisor: Drs. Heru Ribawanto MS. 127 pages + xv

SUMMARY

Effectiveness is a measuring tool for the success of an organization or program in carrying out its activities in order to achieve a goal. A program or activity can be said to be effective if the program is implemented correctly and provides useful results. The effectiveness of village fund allocation management in community empowerment is an indicator to see how successful the objectives of village fund allocation management are so that they are able to carry out activities of community empowerment activities correctly and directed in accordance with what has been planned. In Gupolo village with the smallest number of village fund allocations among other villages in Babadan sub-district the management effectiveness was emphasized to achieve this success.

This research uses descriptive research with a qualitative approach located in the village of Gupolo, while the site is in the village office of Gupolo. Primary data sources are obtained from several interviews from related informants, while secondary data is obtained from documents related to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and several supporting tools such as interview guidelines, and other tools.

The results showed that the management of village fund allocation was divided into six stages: 1) Planning 2) Budgeting 3) Administration 4) Reporting 5) Supervision 6) Accountability. Meanwhile, its use is divided into four empowerment activities, namely 1) PKK development, 2) development and empowerment of planning families, 3) coaching and enhancing village community capacity, 4) fostering activities. Based on research that has been carried out in the field, researchers conclude that the management of village fund allocation has been running effectively because the main purpose of management activities has been achieved in the form of too many stages in the management process. The use of village fund allocation has also been effective based on the fact that all activities have been carried out according to the procedure. Barriers that occur are lack of relations with the private sector and delays in disbursing funds

Researcher's advice is to minimize the obstacles that occur by building relationships with third parties as providers of goods and services and increasing collaboration with academics to solve problems related to community empowerment in the village of Gupolo

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Gupolo Kabupaten Ponorogo)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR. , MS selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Bapak Dr.Fadillah Amin, M. AP, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr., Heru Ribawanto MS., Selaku Ketua Dosen Pembimbing
6. Bapak Dr., Sukanto MS., Selaku Anggota Dosen Pembimbing
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Masyarakat Desa Gupolo dan seluruh perangkat Desa Gupolo yang dengan sukarela berkontribusi dalam penelitian ini.
9. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I.....	 1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II	 13
KAJIAN PUSTAKA	13
A. Teori Administrasi	13
B. Konsep Pengelolaan	14
C. Efektivitas	18
1. Pengertian Efektivitas	18

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	19
3. Pengukuran Efektivitas	21
D. Desa	23
1. Pemerintah Desa	23
2. Keuangan Desa.....	26
E. Alokasi Dana Desa	27
1. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	27
2. Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa	28
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	29
F. Pemberdayaan Masyarakat	31
1. Konsep Pemberdayaan.....	31
2. Indikator Keberdayaan.....	33
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	34
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Fokus penelitian	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Metode Analisis	39
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Desa Gupolo	42
B. Penyajian Data Dan Fokus Penelitian.....	59
1. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan	59
a. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	59
b. Penggunaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	73
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan ADD	87
a. Faktor Pendukung	87

b. Faktor Penghambat	92
C. Analisis Data Fokus	94
1. Efektivitas Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan.....	94
a. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	94
b. Penggunaan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	107
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	113
a. Faktor Pendukung	113
b. Faktor Penghambat	119
BAB V.....	119
PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Alokasi Dana Desa di Kecamatan Babadan	9
Tabel 2. Sejarah Kepemimpinan di Desa Gupolo	44
Tabel 3. Sejarah Kepemimpinan Sekertaris Desa di Desa Gupolo	45
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Gupolo Tahun 2017 menurut usia	47
Tabel 5. Data Kesejahteraan warga Desa Gupolo	48
Tabel 6. Jumlah penduduk menurut Usia Kelompok Kerja	48
Tabel 7. Mata Pencahaian Penduduk Desa Gupolo	50
Tabel 8. Kondisi wilayah Desa Gupolo tahun 2017	54
Tabel 9. Rekapitulasi Rencana Penggunaan ADD Tahun 2017	63
Tabel 10. Rincian penggunaan ADD tahun anggaran 2017	
Pembinaan PKK	73
Tabel 11. Rincian penggunaan ADD tahun anggaran 2017	
Pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Berencana	76
Tabel 12. Rincian penggunaan ADD tahun anggaran 2017	
Pembekalan dan peningkatan Kapasitas Kepala Desa	78
Tabel 13. Rincian penggunaan ADD tahun anggaran 2017	
Sosialisai keluarga sadar hukum	79
Tabel 14. Rincian penggunaan ADD tahun anggaran 2017	
Sosialisai Pola asuh anak	79
Tabel 15. Rincian penggunaan ADD tahun anggaran 2017	
Sosilaisasi Poskedes	80
Tabel 16. Rincian penggunaan ADD tahun anggaran 2017	

Sosialisai Kader JUMANTIK.....	80
--------------------------------	----

Tabel 17. Rincian penggunaan ADD tahun anggaran 2017

Pembinaan pelaksana Kegiatan	84
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar1. Kantor desa Gupolo	43
Gambar 2. Struktur Pemerintahan Desa Gupolo	57
Gamabar 3. Baner Sosialisasi Di Desa Gupolo	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran1. Observasi Penulis.....	125
Lampiran 2. Dokumen Desa.....	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai suatu otoritas yang menjalankan fungsi administrasi dalam mengatur kehidupan rakyatnya sejatinya berada pada hirarkis tertinggi dalam urusan tata kelola pemerintahan. Menurut Syamsudin (2010) Kata administrasi yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata administrare (latin : ad=pada, ministarare = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal katanya administrasi dapat berarti “memberikan pelayanan kepada”, juga berasal dari kata administer yang dapat berarti to manage (mengelola) dan direct (menggerakan). Kesimpulannya administrasi merupakan kegiatan untuk mengelola atau menggerakan sesuatu.

Fungsi pelaksanaan administrasi dimiliki oleh seluruh bentuk pemerintahan di setiap tingkatan, karena kata administrasi sendiri mempunyai padanan berupa mengelola maka setiap bentuk dan tingkatan pemerintahan juga memiliki fungsi pengelolaan. Berdasarkan pada asumsi tersebut maka pasal 18 Undang Undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia didasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang. Daerah Indonesia sebagai sebuah kesatuan utuh dibagi menjadi daerah provinsi yang lebih kecil untuk

kemudian dibagi lagi menjadi daerah seperti Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Setiap tingkatan pemerintahan tersebut mempunyai fungsi pengelolaan masing masing dan saling terkordinasi antara satu dengan lainnya.

Desa adalah sebuah kesatuan sosial, ekonomi, dan politik yang mempunyai batasan geografis berupa gejala alam maupun batas buatan manusia. Secara struktural pemerintahanan Desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundang undangan telah mengatur secara jelas dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dimana dikatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar dasar pemikiran dalam mengatur Desa adalah keanekaragaman, kearifan lokal, partisipasi, asas permusyawaratan serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan sejarahnya Desa merupakan embrio dari kesatuan politik masyarakat dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara ini diproklamirkan. Widjaja (2003: 4) menyatakan bahwa posisi Desa sebagai sebuah institusi sosial memiliki peran penting sebagai cikal bakal terwujudnya kesadaran masyarakat akan kesatuan antar individu guna mewujudkan lembaga pemerintahan dengan ciri struktural dan sistematis. Melalui pendekatan tradisi dan adat istiadatnya Desa bisa dikatakan sebagai manifestasi paling nyata dari apa yang kita sebut sebagai bangsa Indonesia saat ini.

Berdasarkan pemahaman bahwasanya Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan maka bukanlah hal yang berlebihan jika pemerintah pusat

menempatkan Desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan masyarakat. Kewenangan Desa yang meliputi penyelenggaraan fungsi administrasi di tingkat bawah, penyediaan sarana dan prasarana umum seperti PUSKEMAS dan Sekolah Dasar, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial menjadikan Desa memiliki peran strategis dalam kemajuan Negara. Bersama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Desa merupakan sebuah kesatuan pemerintahan daerah yang memiliki otonomi seluas luasnya untuk mengatur dan memberdayakan potensi yang dimilikinya guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan Desa juga terdapat pembagian kekuasaan yang berimbang antara kepala Desa sebagai pemimpin dan pelaksana kebijakan dengan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD sebagai lembaga yang berfungsi membuat sekaligus mengawasi kebijakan. Berdasarkan Undang Undang yang telah ditetapkan pemerintah, kewenangan kepala Desa adalah mewakili pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3), dimana kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan Desa (UU RI No 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1) . sedangkan kewajiban kepala Desa menurut UU RI No 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 adalah

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Mentati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa berdasarkan konsep akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efektifitas dan efisiensi yang bebas dari KKN
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa

UU No 6 tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa, Badan permusyawratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dimana anggotanya terdiri dari wakil penduduk Desa berdasarkan pertimbangan keterwakilan wilayahnya dan ditetapkan secara demokratis, biasanya melalui musyawarah Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4). Sementara itu Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala Desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

1. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Pengelolaan keuangan Desa sebagai salah satu aspek terpenting dalam peyelenggaraan pemerintahan dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan belanja Desa (APB Desa). Sumber pendapatan Desa diambil dari badan usaha milik Desa, usaha partisipasi dari masyarakat Desa dan pendapatan pendapatan sah lainnya. Berdasarkan peraturan lainnya, hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa yang menyebutkan bahwa *“Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa*

uang atau barang yang dapat dijadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

Kemandirian Desa dalam mengelola masalah keuangan merupakan wujud dari penerapan otonomi daerah pada tingkatan yang paling bawah. Hal ini memberikan keleluasan pada pemerintah Desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa secara optimal. Orientasi hasil dan pencapaian dari adanya keleluasaan Desa dalam mengelola keuangannya sendiri masih tetap menjadi tujuan utama dari kebijakan ini. Agar pada proses pengelolaan keuangan Desa tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat serta kontrol dari berbagai pihak, baik otoritas yang berwenang maupun masyarakat sebagai wujud partisipasi bersama.

Secara fundamental otonomi memang akan lebih berdampak besar jika dijalankan pada tingkat pemerintah Desa, hal ini terjadi karena sebenarnya pemerintah Desa memiliki kapasitas yang lebih baik dalam melihat arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat pada tingkatan yang paling dasar. Hal hal seperti penyediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pendidikan dasar, dan pemberdayaan masyarakat merupakan contoh dari kapasitas yang dimiliki oleh Desa. Dengan asumsi seperti itu maka bentuk otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah sebenarnya merupakan otonomi bertingkat dimana Provinsi memiliki otonomi terbatas, Kabupaten Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli bulat dan utuh.

Adanya alokasi dana Desa (ADD) sebagai upaya pemerintah untuk mengucurkan dana perimbangan merupakan konsekuensi logis dari kemadirian tata kelola keuangan yang dimiliki Desa sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan bahwa masyarakat sekarang memiliki potensi untuk lebih sejahtera dari sebelum adanya alokasi dana Desa (ADD). Melalui berbagai macam post pemberdayaan dan proyek pembangunan yang difasilitasi Desa masyarakat hendaknya ikut andil sebagai subyek pembangunan yang berperan aktif.

Pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi yang berada di negara ini mendukung secara penuh pelaksanaan kewenangan Desa untuk mengatur keuangannya secara mandiri, hal ini bisa kita lihat dengan mencermati Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menyebutkan secara jelas mengenai sumber sumber pendapatan Desa yang berjumlah tujuh macam, yaitu:

- a. Pendapatan asli Desa, tersusun oleh hasil usaha, aset yang dimiliki Desa, swadaya dan partisipasi masyarakat (iuran, tarikan dll)
- b. Alokasi APBN (dana Desa) yang merupakan alokasi kucuran dana dari pemerintah pusat ke Desa
- c. Bagi Hasil dari pajak daerah dan Retribusi (PDRD) Kabupaten/kota dengan porsi minimal 10% dari keseluruhan hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa yaitu bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%
- e. Bantuan keuangan dari APBD
- f. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Pendapatan lain lain yang sah

Perlu dicermati bahwa pada salah satu pasal tersebut telah mengatakan secara jelas kepada pemerintah Kabupaten untuk memberikan alokasi dana perimbangan yang telah diterima diterimnya dari pusat kepada Desa-Desa dalam bentuk alokasi dana Desa (ADD) dengan dasar perhitungan sebesar 10% dari dana

perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lebih lanjut lagi dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 96 ayat (3) penyaluran alokasi dana Desa harus mempertimbangkan beberapa faktor antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, angka penduduk miskin, dan kondisi geografis suatu Desa. Sebagai contoh mengenai besaran dana yang dilokasikan dalam ADD pada kurun waktu 2015-2016 saja pemerintah Kabupaten Ponorogo setidaknya telah mengucurkan dana sebesar Rp.107.003.073.000 untuk alokasi dana Desa dimana setiap Desa rata rata menerima alokasi dana Desa sebesar 300 sampai 400 juta (Bappeda.ponorog.go.id)

Besarnya jumlah alokasi dana Desa yang diterima oleh setiap Desa kemudian memunculkan pertanyaan apakah sumber daya manusia yang berada di Desa mempunyai kapasitas untuk dapat melaksanakan pengelolaan secara profesional. Mengingat kultur sentralistik yang selama ini selalu melekat kuat pada pemerintahan Desa dan ditambah kebijakan ADD ini merupakan kebijakan yang terhitung rumit, maka kekhawatiran mengenai tidak terlaksananya pengelolaan alokasi dana Desa secara efektif dan efisien cukup beralasan. Kelemahan dari pemerintah Desa menurut Wasistiono dan Tahir (2006) didefinisikan menjadi empat point yaitu :

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki Desa pada umumnya masih rendah
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah Desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat Desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil) implementasi

- kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan
4. Sarana dan prasana penunjang perasional administrasi pemerintahan masih sangat terbatas, selain mengganggu efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan,

Pemerintah Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo saat ini mengalami permasalahan yang sama yaitu apakah pemerintah Desa beserta elemen elemen yang ada didalamnya sudah mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara efektif dan efisien. Jika melihat tujuan dari adanya alokasi dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah Desa melalui pemberdayaan masyarakat maka kunci keberhasilan dari pengelolaan alokasi dana Desa selain efektifitas dan efisiensi adalah adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara serius dan tepat sasaran.

Pada Tahun anggaran 2017, Pendapatan Desa Gupolo sebesar Rp.1.444.198.321. pendapatan ini berasal dari berbagai sumber antara lain yaitu pendapatan asli desa, Pendapatan dana transfer yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan daerah. Karena desa Gupolo sendiri memiliki PAD yang terbilang cukup kecil yaitu sekitar Rp.176.986.000 maka desa Gupolo sangat bergantung terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai sumber utama dalam anggaran belanja mereka. Khusus untuk ADD pada tahun 2017 sendiri pemerintah desa Gupolo mendapatkan dana sebesar Rp.339.386.000 (Sumber Arsip Desa Gupolo Tentang ADD Tahun 2017). Penggunaan ADD sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati No 17 tahun 2016 dimana 30% digunakan untuk

belanja operasional pemerintah desa dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Belum ada sebuah kajian mendalam mengenai kegiatan apa saja yang harus diberdayakan secara serius oleh pemerintah Desa Gupolo kepada masyarakatnya. Padahal harus ada skala prioritas dalam pemilihan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena tidak mungkin melaksanakan seluruh jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat mengingat alokasi dana desa yang diterima juga terbatas. Sebagai perbandingan marilah kita lihat besaran dana yang diterima oleh Desa Gupolo dengan Desa Desa lain di kecamatan Babadan.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa di Kecamatan Babadan

Alokasi dana Desa di Kecamatan Babadan				
No	Nama Desa	Dana Desa	ADD	Total
1	Cekok	771.954.000	344.221.000	616.175.000
2	Japan	775.114.000	372.467.000	637.581.000
3	Gupolo	766.607.000	361.355.000	607.633.000
4	Polorejo	776.939.000	390.989.000	667.928.000
5	Bareng	770.051.000	386.134.000	596.185.000
6	Ngunut	778.406.000	371.095.000	649.501.000
7	Sukosari	788.379.000	426.804.000	715.183.000
8	Lembah	779.552.000	421.591.000	701.143.000
9	Pondok	773.242.000	363.605.000	606.847.000
10	Babadan	773.421.000	370.373.000	644.220.000
11	Purwosari	778.421.000	380.577.000	658.998.000
12	Trisono	785.251.000	449.241.000	734.492.000

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Ponorogo (Diolah Peneliti)

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwasanya jika dibandingkan dengan Desa Desa lain di Kecamatan Babadan porsi dana yang diterima oleh Desa Gupolo termasuk kecil sehingga pengelolaan anggaran yang baik diperlukan agar outcome yang diterima masyarakat bisa optimal. Pengelolaan anggaran secara baik sendiri harus didasarkan pada pemilihan bentuk program yang akan dilaksanakan semisal pemberdayaan pada bidang apa saja yang mendapat skala prioritas terbesar sehingga sesuai dengan visi dan misi Desa.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi Desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi

Menarik kesimpulan dari pernyataan diatas maka penelitian ini akan menitikberatkan pada efektivitas ADD dalam pemberdayaan masyarakat dimana efektivitas sendiri merupakan alat pengukur keberhasilan suatu organisasi maupun program dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil bermanfaat. Melihat permasalahan yang dijelaskan peneliti di paragraf sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaiman efektivitas ADD yang dilihat dari segi pengelolaanya yang termasuk didalamnya adalah penggunaan dan hambatan yang dihadapinya sehingga output ADD dalam pemberdayaan

masyarakat dapat tercapai. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian “ **Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pengelolaan alokasi dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan alokasi dana Desa secara efektif bagi pemberdayaan masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mengetahui efektifitas pengelolaan alokasi dana Desa Gupolo dalam pemberdayaan masyarakat
2. Untuk mengetahui faktor faktor penghambat pengelolaan dana Desa yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi kepada pemerintah Desa Gupolo mengenai pengelolaan alokasi dana Desa (ADD)
2. Sebagai bahan kajian yang relevan terhadap penelitian selanjutnya

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang diuraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara berurutan mulai dari bab I sampai dengan bab V dimana pada masing-masing bab membahas materi-materi muatan yang berbeda satu sama lain yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk membuat penelitian, serta masalah yang dibahas oleh penulis dan juga fungsi dari penelitian ini untuk masyarakat sekitar

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana tinjauan pustaka ini berisi mengenai pendapat para ahli ataupun dari hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti untuk kemudian dianalisis sesuai teori teori yang sudah ada. Analisis ini akan membuat gambaran tentang fenomena yang diteliti oleh peneliti

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah didapat peneliti melalui proses analisis yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya. Dari kesimpulan mengenai fenomena itu maka peneliti akan memberikan sejumlah saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut The Liang Gie (1999: 14) administrasi adalah “Segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.” Masih dari sumber yang sama, definisi administrasi menurut Luther Gullick yaitu “*Administrstion has to do with getting things done, with the accomplishment of defenid objectives.*” Jadi menurut Gullick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang hendak ditetapkan.

Newman, menyebut “*The Work of Administration*” yang dapat dibagi dalam 5 proses, yaitu:

1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing)
3. Pengumpulan Sumber (Assembling Resources)
4. Pengelolaan Kerja (Supervising)

5. Pengawasan(Controlling)

B. Konsep Pengelolaan

Definisi pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Manajemen sendiri berpadanan kata dengan Administrasi sebab istilah ini sering dipakai bergantian dalam artian yang sama (Sjamsiar, 2010:7). Berdasarkan pada pernyataan diatas maka tiga kata tersebut, yaitu pengelolaan, manajemen dan administrasi mempunyai keterkaitan yang erat. Selanjutnya mengambil sudut pandang administrasi dari Siagian bahwasanya administrasi adalah sebuah keseluruhan proses manajemen antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara jika mengambil sudut pandang manajemen maka manajemen bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang didalamnya terdapat kegiatan penyusunan rencana, pengambilan keputusan, eksekusi kegiatan, pengendalian organisasi, keuangan, material dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan keterkaitan yang erat antara manajemen dan pengelolaan maka proses pelaksanaan manajemen dan pengelolaan merupakan sebuah kesatuan yang mempunyai dasar yang sama. Terkait dengan pelaksanaan manajemen, Nanang Fattah (2004:1 menyatakan bahwa : “dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Kepemimpinan(Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya

organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pertanggungjawaban. empat hal tersebut disingkat menjadi akronim POAC, yaitu :

1. Planning (perencanaan)
2. Organizing (pengeorganisasian)
3. Actuating (pergerakan)
4. Controlling (pengawasan)

Keseluruhan proses tersebut merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga pada setiap tahapannya harus dilaksanakan dengan cermat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketidaksempurnaan dalam menjalankan salah satu proses tersebut akan berdampak terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan.

Mengambil lagi dari teori POSDECORB yang dikemukakan oleh Luther Gulick dimana istilah POSDCORB merupakan singkatan dari : *Planning, Organising, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*. Maka penjabaran teori ini adalah sebagai berikut .

1. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yang harus dikerjakan, dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Henry Fayol telah menunjukkan adanya 8 kriteria bagi suatu rencana yang baik.

Dalam pemerintahan, dikenal tiga macam perencanaan, yakni: perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek.

2. Yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian sebenarnya merupakan proses mengorganisasikan orang-orang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Karena itu, dalam administrasi negara masalah organisasi dan personalia merupakan dua faktor utama.

3. Yang dimaksudkan dengan penyediaan staf adalah pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam upaya mengembangkan staf metode yang dapat dipergunakan, antara lain: latihan jabatan, penugasan khusus, simulasi, permainan peranan, satuan tugas penelitian, pengembangan diri dan seterusnya. Sementara itu ada tiga tipe program pengembangan staf yang terdiri dari: presupervisory programs, middle management programs dan executive development programs.

4. Yang dimaksudkan dengan pengarahan adalah pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum. Fungsi pengarahan melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, ilmu-ilmu perilaku telah memberikan sumbangan besar dalam bidang-bidang motivasi dan komunikasi.

5. Yang dimaksudkan dengan pengoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk mempertalikan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi.

Mengenai koordinasi ada beda pandang antara beberapa sarjana. Di satu pihak ada yang memandangnya sebagai fungsi manajemen. Sedang pihak yang lain, menganggapnya sebagai tujuan manajemen. Dalam pandangan yang kedua, keberhasilan koordinasi sepenuhnya tergantung pada keberhasilan atau efektivitas dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

6. Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer.

7. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Sesuatu anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme. Allen Schick mengungkapkan adanya tiga tujuan anggaran: pengawasan, manajemen, dan perencanaan. Sedangkan fungsi anggaran berdasarkan perjalanannya historisnya terdiri dari empat macam yaitu: fungsi kontrol, fungsi manajemen, fungsi perencanaan, dan fungsi evaluasi.

Dari beberapa pernyataan tentang definisi pengelolaan, manajemen dan administrasi dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar dasar tentang kegiatan pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan serta pengawasan terhadap sumber daya baik sumber daya manusia,

materi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya untuk dapat mencapai tujuan awal organisasi secara efektif dan efisien.

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah standar untuk mengukur apakah tujuan dan sasaran telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Efektivitas menjadi sangat penting dan menjadi unsur pokok dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program yang bercorak sistematis. Menurut Kurniawan (2005;19) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program ataupun misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Dan menurut Soewarno Handyaningrat S. (1994 : 16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan secara singkat bahwasanya efektivitas merupakan sebuah ukuran untuk melihat sejauh mana ketercapaian target pelaksanaan yang meliputi kualitas, kuantitas, dan durasi waktu pelaksanaannya dibandingkan dengan target target yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan konsep efektivitas maka segala sesuatu yang sebelumnya memiliki rencana mengenai target target capaian dapat didefinisikan dalam sebuah standar yang baku. Upaya dalam mengevaluasi suatu sistem menejerial atau pengelolaan suatu hal juga dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep efektivitas selanjutnya digunakan untuk menentukan pertimbangan apakah perlu dilaksanakan perubahan perubahan yang fundamental dan

signifikan terhadap bentuk dan metode menejerial atau pengeleloaan tersebut ataukah hanya perlu merubah unsur unsur teknis pelaksanaan saja. Suatu pengelolaan dapat dikatakan efektif jika dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai dengan standar yang telah dirumuskan dan memberikan hasil yang bermanfaat

Efektivitas menurut Hidayat (1986 :25) “adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kauliatas dan waktu)telah dicapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.” Berdasarakan mendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengukuran efektivitas paling mudah adalah dengan melihat prentaseny. Rencana awal dari suatu kegiatan atau program pasti disusun berdasarkan asumsi target capaian sebesar 100%. Hal ini kemudian dibandingkan dengan capaian pelaksanaan kegiatan atau program, apakah nilainya mampu mencapai 100% seperti target perencanaan atau justru lebih rendah.

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut steers (1985: 9-10), organisasi dalam upaya mencapai efektivitas organisasi tidak lepas dari faktor faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi tersebut adalah.

a. Karakteristik organisasi

Karakteristik organisasi pada umumnya terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Yang dimaksud dengan struktur adalah cara unik organisasi dalam menyusun dan menempatkan orang orangnya pada posisi

posisi tertentu untuk menciptakan sebuah organisasi secara utuh. Yang meliputi luasnya desentralisasi pengendalian, Jumlah spesialisasi pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan teknologi adalah mekanisme yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran yang bersifat siap pakai.

b. Karakteristik Lingkungan

Lingkungan mencakup dua aspek yang agak berbeda tetapi berhubungan. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu kekuatan yang timbul diluar batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi. Sedangkan kedua adalah lingkungan intern yaitu apa yang sering kita kenal dengan iklim organisasi, bermacam macam atribut dalam lingkungan kerja (prestasi, orientasi) yang memengaruhi hubungan dengan efektivitas organisasi

c. Karakteristik Pekerja

Pekerjaan yang berlainan dalam organisasi menyebabkan adanya perbedaan pandangan, kemampuan, tujuan, kebutuhan yang berbeda beda dari individu yang ada di dalamnya. Variasi sering menyebabkan perilaku individu berbeda walaupun mereka ditempatkan di bagian yang sama. Perbedaan-perbedaan ini mempunyai pengaruh yang langsung terhadap proses pencapaian efektivitas organisasi yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individual.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Peran manajer sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan melalui proses perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Adalah kewajiban dari manajer untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada.

Dengan melihat faktor faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas maka penentuan akan variabel yang perlu perhatian khusus menjadi lebih mudah dan tidak melebar ke variabel lain yang nyatanya tidak berhubungan dengan efektivitas.

3. Pengukuran Efektivitas

Dalam usaha untuk mengukur efektivitas organisasi para sosiolog dan psikolog di bidang industri selalu melihat konsep efektivitas dari sudut pandang terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Mengutip pendapat Sterrs (1985: 45) “Jika kita melihat studi studi empiris mengenai efektivitas terbaru, yang telah menggunakan ukuran ukuran yang univariasi, harus diambil kesimpulan bahwa hanya sedikit yang berubah sejak penilaian awal dibuat oleh thordinke”. Melihat kenyataan bahwa mendefinisikan instrumen pengukuran mengenai efektivitas organisasi adalah suatu hal yang sangat sulit maka kemudian terdapat pembenaran jika variabel yang nantinya digunakan merupakan sebuah siklus perputaran dimulai dari input, pengelolaan, output kemudian menjadi feed back. Berikut ini sebagian dari daftar ukuran univariasi untuk efektivitas organisasi menurut Steers (1985: 46) :

- a. Efektivitas keseluruhan
Sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasarnya.
- b. Kualitas
Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi. Terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.
- c. Produktivitas
Kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan. Tingkatan individual, kelompok dan keseluruhan organisasi.
- d. Kesiagaan
Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan suatu tugas khusus dengan baik jika diminta.
- e. Efisiensi
Sebuah nilai yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- f. Pertumbuhan
Penambahan dalam hal hal seperti tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba, bagian pasar, dan penemuan penemuan baru. Suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa lalunya.
- g. Pemanfaatan lingkungan
Merupakan batas keberhasilan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Memperoleh sumber daya yang langka dan berharga yang diperlukannya untuk operasi yang efektif. Hal ini dipandang dari rencana jangka panjang yang optimum dan bukan dalam rencana jangka pendek yang maksimal.
- h. Stabilitas
Pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode periode sulit.
- i. Penerimaan tujuan organisasi
Diterimanya setiap tujuan organisasi oleh setiap pribadi oleh unit unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak.
- j. Penilaian oleh pihak luar
Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi oleh mereka yang berada dalam lingkungannya, yaitu pihak pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan.

Standar ukuran universitas yang tercantum diatas dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat bagaimana tingkat efektivitas organisasi secara lebih

komprehensif sehingga proses pengukuran efektivitas tidak melebar ke berbagai aspek yang tidak seharusnya diukur.

D. Desa

1. Pemerintah Desa

Asas penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia menganut prinsip otonomi yang asli, bulat dan utuh dalam artian desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Namun dari itu penyelenggara pemerintah desa tetap merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah pusat Indonesia yang secara khusus memperoleh pendelegasian hak-hak tertentu.

Berdasar pada pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia dilakukan atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya diatur melalui undang-undang. Widjaja (2003:1) menyatakan bahwa dikarenakan Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Hal ini menegaskan walaupun daerah menerima otonomi seluas luasnya dari pusat namun daerah tetaplah bagian dari hirarki sistem pemerintahan yang berarti tidak akan ada negara dalam sebuah negara seperti yang pada bentuk negara federal.

Pada prinsipnya wilayah Indonesia akan dibagi ke dalam daerah-daerah berupa provinsi dan daerah provinsi akan dibagi lagi menjadi daerah lain yang lebih kecil dalam artian Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota juga akan dibagi lagi menjadi kecamatan dan desa. Di daerah yang bersifat otonom (*streek en*

locale rechtgemen schapen) atau bersifat otonom belaka, semuanya menurut pada aturan yang akan ditetapkan oleh undang undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah sehingga di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Kewenangan Desa tercantum secara lengkap didalam undang Undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang meliputi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara otonom, pelaksanaan proses pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan yang terakhir adalah kewenangan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa didasarkan pada permusyawaratan antara perangkat desa dengan masyarakat. Kewenangan tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan rumah tangga desa dengan lebih baik.

Hal hal yang berkaitan dengan struktur pemerintahan desa diatur di dalam Pasal 202 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sendiri terbagi menjadi tiga yaitu sekertaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintah Desa. Kepala Desa mempunyai tugas untuk memimpin staf dan aparaturnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. sebagai seorang pemimpin tunggal di desa posisi kepala desa dapat disetarakan dengan presiden dalam suatu negara.

Menurut (surianingrat 1985:81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerinthan desa bersama sama dengan pamong desa dimana kepala desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan urusan pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai batasan batasan tertentu sehingga dapat menuruti keinginanya sendiri.

Dalam menjalankan tugas kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat seperti yang tertuang pada (pasal 14 (1) UU No.72 Tahun 2005. Sementara dalam menjalankan tugasnya kepala desa berwenang untuk :

- 1) Memimpin penyelenggraan pemerintahan desa berdasrakan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peaturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan Bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDES untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secarapartisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang undangan (pasal 14(2) UU No. 72 Tahun 2005

b. Sekertaris Desa

Sekertaris desa merupakan seorang Pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan administrasi di desa. Sesuai dengan pasal 202 ayat (3) UU No. 32 tahun2004 “sekertaris desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pegawai negeri sipil

yang memenuhi persyaratan”. Pengangkatan sekretaris desa dilakukan oleh sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pelaksana Teknis Lapangan

Pelaksana teknis lapangan merujuk pada seseorang warga desa yang diberikan mandat untuk menjalankan fungsi fungsi tertentu di dalam pemerintahan desa. Surianingrat dalam bukunya berjudul Pemerintahan Administrasi Desa dan kelurahan tahun 1985 menyebut pelaksana teknis lapangan dengan istilah “Pamong Desa”.

Desa desa di pulau jawa umumnya menggunakan istilah khusus untuk menyebut masing masing pelaksana teknis lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti Kamituwo yang mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pada wilayah pedukuhan, Sambong yang bertugas dalam pengelolaan sarana irigasi, Jogoboyo atau petugas keamanan desa, dan Carik yang bertugas sebagai juru tulis desa.

2. Keuangan Desa

UU No.6 tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan desa juga diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa. Yaitu bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa, tersusun oleh hasil usaha, aset yang dimiliki desa, swadaya dan partisipasi masyarakat (iuran, tarikan dll)
- b. Alokasi APBN (dana Desa) yang merupakan alokasi kucuran dana dari pemerintah pusat ke desa
- c. Bagi Hasil dari pajak daerah dan Retribusi (PDRD) Kabupaten/kota dengan porsi minimal 10% dari keseluruhan hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%
- e. Bantuan keuangan dari APBD
- f. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Pendapatan lain lain yang sah

Berdasarkan Permendagri No 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 menyebutkan bahwa Pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang akan dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari SEKDES dan bendahara desa berdasarkan keputusan kepala desa.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 januari hingga 31 Desember (Nurcholis, 2011:82). Jadi semua kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan , pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa dilakukan dalam periode satu tahun penuh.

E. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Sebagai upaya guna meningkatkan pembangunan desa menuju kemadirian berbasis potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Maka pemerintah melalui Permendagri No. 37 tahun 2007 menjelaskan bahwa perlu adanya alokasi yang merupakan bagian dari dana keuangan pusat

dan daerah kepada desa dalam bentuk alokasi Dana desa. Lebih lanjut Permendagri No. 37 tahun 2007 menjelaskan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota paling sedikit sejumlah 10 % yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alokasi dana desa mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pembangunan desa karena merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Melalui alokasi Dana desa diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya serta dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan kegiatan desa yang bersal dari inisiatif pemerintah desa dan masyarakat merupakan fokus utama untuk dibiayai oleh alokasi dana desa.

2. Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Maksud dan tujuan dari adanya alokasi dana desa atau yang selanjutnya disingkat menjadi ADD adalah untuk memeprecepat proses pembangunan desa melalui sisitem penyelenggraan pemerintahan desa yang baik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut PermendagriNo. 37 Tahun2007 tujuan ADD adalah untuk :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrasrtruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningktan sosial
- e. Meningkatkan kententrman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka penegmabanagan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha milik desa (BUMDES)

Melalui ADD diharapkan pemerintah desa dapat menjadi satu instansi yang kuat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat diandalkan ketika menjalankan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat pada tingkatan paling mendasar. Dengan adanya ADD berarti desa mempunyai satu sumber pendapatan yang pasti dan dapat diandalkan guna mencegah kekosongan pada kas desa.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan pada peraturan Menteri dalam Negeri No 37 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Sementara pengelolaan ADD yang dicantumkan dalam peraturan Menteri dalam negeri No 37 tahun 2007 pasal 20 menyebutkan bahwa pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Melalui peraturan tersebut maka dapat disimpulkan jika pengelolaan ADD berada pada satu kerangka utuh didalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 37 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa penggunaan anggaran ADD dikelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan, 30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional

pemerintah desa sementara 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Didalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 4 Ayat (1),(2),(3) dan (4) juga disebutkan bahwa Prinsip Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Pasal 4

- 41 Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang APBDesa;
- 42 Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- 43 Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali;
- 44 Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya porsi pemberdayaan masyarakat yang mencapai 70% merupakan wujud upaya pemerintah untuk mengatur agar alokasi dana desa dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat desa. ADD juga akan dapat menguatkan perencanaan yang bersifat partisipatif dan masyarakat dapat merealisasikan kebutuhannya secara lebih cepat dengan musyawarah bersama lembaga-lembaga yang ada di desa.

F. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan

Konsep tentang pembangunan ekonomi masyarakat yang mencakup aspek aspek sosial dan budaya dapat didefinisikan sebagai pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menekankan pembangunan masyarakat melalui pendekatan gaya baru yang bersifat “people centered, participatory, empowering and sustainable. (Chambers,1995). Melalui pendekatan ini kebutuhan dasar masyarakat akan peningkatan taraf hidup dan pengembangan potensi secara mandiri dapat dipenuhi.

Definisi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat diungkapkan agak berbeda dengan memakai pengertian pemberdayaan rakyat oleh Mubyarto (1993:204) yaitu: “Praktek memperdayakan rakyat adalah berupa tindakan tindakan yang kongkrit dapat meningkatkan kemampuan (kualitas) sumber daya manusia. Selain itu praktek pemberdayaan rakyat adalah merupakan upaya membuka pengertian atau kesadaran yang lebih luas tentang hak dan kewajiban politik, ekonomi, sosial, kultural maupun hukum.

Secara substansi pemberdayaan masyarakat merupakan usaha usaha yang dilaksanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya sehingga masyarakat dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain pemberdayaan adalah usaha untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri lepas dari ketergantungan dari pihak manapun.

Usaha untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dapat dikaji dari tiga fase yaitu : pertama menciptakan iklim dimana masyarakat dapat mengembangkan potensi di dalamnya. Hal ini harus didasarkan pada keyakinan

bahwa setiap masyarakat pasti memiliki potensi sekecil apapun. Pemberdayaan mempunyai peran untuk mendorong dan menyadarkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri.

Kedua, menguatkan potensi yang sudah dimiliki masyarakat. dalam fase ini perlu langkah langkah yang lebih nyata yang sifatnya lebih teknis meliputi : peningkatan taraf pendidikan masyarakat, ketersediaan akses kesehatan dan kemudahan memperoleh sumber sumber kemajuan seperti modal, teknologi, informasi dan pasar. Lebih spesifik hal yang perlu dilaksanakan pada fase ini adalah pembangunan sarana parasarana dasar berupa infrastruktur jalan raya, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta ketersediaan lembaga permodalan dan pemasaran di tengah masyarakat.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat memasuki fase perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri Dimana masyarakat sebagai subyek pemberdayaan harus senantiasa siap menghadapi ancaman dari pihak yang lebih kuat untuk mencegah dominasi dan monopoli yang akhirnya akan merugikan masyarakat. Melindungi tidak berarti menutup diri dari interaksi secara total dengan pihak pihak lain melainkan lebih kepada sebuah jaminan akan kemandirian masyarakat dapat berlangsung tanpa potensi untuk kembali menjadi ketergantungan pada berbagai pemberian bertendensi.

2. Indikator Keberdayaan

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley yang merumuskan delapan indikator pemberdayaan yang lebih dikenal sebagai empowerment index Dalam suharto (2005 : 216) meliputi :

- a. Kebebasan mobilitas : kemampuan indikator untuk pergi keluar rumahnya atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas dianggap tinggi jika individu mampu pergi secara mandiri
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan untuk membeli barang barang kebutuhan keluarga sehari hari dan kebutuhan dirinya.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang barang yang sifatnya sekunder dan tersier
- d. Terlibat dalam keputusan keputusan rumah tangga : mampu membuat keputusan secara mandiri maupun kolektif mengenai keputusan keluarga
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga : dimana individu tidak terikat secara rigid dengan keluarga saat memilih suatu keputusan yang menyangkut dirinya
- f. Kesadaran hukum dan politik ; mengetahui tentang kondisi politik secara elementer seperti nama anggota DPRD setempat, Nama menteri atau nama presiden
- g. Keterlibatan dan kampanye serta protes : seorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes terhadap suatu hal yang menurutnya tidak adil.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : Memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Dimana seorang dapat dikatakan berdaya jika memiliki hal tersebut secara terpisah dari pasangan.

Indikator keberdayaan ini merupakan instrumen sederhana untuk melihat poin poin apa saja yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai tingkat keberdayaan tertentu. Keberdayaan individu dapat dicapai salah satunya melalui usaha pemberdayaan baik yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasamita (1995) strategi utama pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan secara simultan meliputi :

- a. Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum ditingkat nasional sampai menjadi nilai yang inheren pada tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat; demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah kepada elite masyarakat.
- b. Desentralisasi dan kemendarian dalam pengambilan keputusan agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat ; hal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemecahan masalah pembangunan

- c. Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam melayani kebutuhan penduduk miskin dan marjinal
- d. Kebelanjutan program atau proyek dengan memfasilitasi gerakan masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil program dan proyek tersebut
- e. Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial, fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marjinal kepada pihak lainnya sehingga akses kepada penduduk miskin terbuka lebar.

4. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai mencapai keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat tercapai. Menurut Soedraha dalam Sumaryadi (2005; 145) diperlukan berbagai program pemberdayaan diantaranya.

- a. **Pemberdayaan politik**

Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan bergainang position yang diperintah terhadap pemerintah, melalui bergainang position tersebut masyarakat sebagai subyek pemerintah akan mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain

- b. **Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah atau masyarakat sebagai konsumen dalam hal pertumbuhan dan beban pembangunan

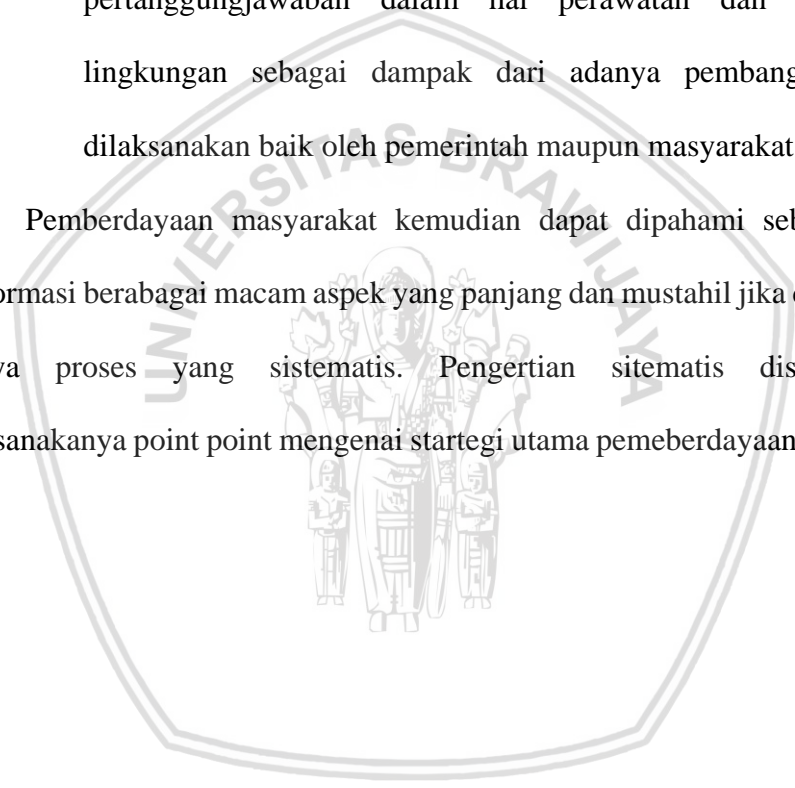
- c. **Pemberdayaan Sosial Budaya**

Pemberdayaan sosial budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investemen* guna meningkatkan nilai dasar manusia dan perilakunya

d. Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program pertanggungjawaban dalam hal perawatan dan pelestarian lingkungan sebagai dampak dari adanya pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat kemudian dapat dipahami sebagai usaha transformasi berbagai macam aspek yang panjang dan mustahil jika dilalui tanpa adanya proses yang sistematis. Pengertian sistematis disini adalah dilaksanakannya point point mengenai strategi utama pemberdayaan masyarakat



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara fundamental metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh suatu data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu karya ilmiah karena menjadi acuan mengenai langkah langkah prosedural yang harus dijalani dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa peneliti akan melaksanakan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat situasi dan kondisi secara lebih dekat pada efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pengembangan masyarakat.

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk penelitian yang menekankan pada penjajagan (ekspolratif), deskriptif, penjelasan, dan prediksi prediksi untuk meramalkan suatu fenomena. Lebih lanjut peneliti memilih menggunakan analisa yang bersifat diskriptif yang juga terdapat dalam fungsi penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif adalah sesuai dengan pernyataan Masri Singarimbundan Sofian Effendi (2006:4), bahwa

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, dan lain-lain. Peneliti mengembangkan suatu konsep menghimpun fakta namun tidak melakukan proses hipotesa.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah permasalahan mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat ini merupakan fenomena sosial yang dapat dipaparkan dan dijawab secara lebih komprehensif jika diteliti menggunakan metode tersebut.

B. Fokus penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:208), bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkatan kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gupolo berdasarkan teori POAC George R Terry dalam H. Malayu (2006:2) :
 - a. Perencanaan
 - b. Penganggaran
 - c. Penatausahaan
 - d. Penggunaan
 - e. Pertanggung Jawaban

- f. Pengawasan
- 2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Gupolo dilihat dari Penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat antara lain :
 - a. Pembinaan PKK
 - b. Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Berencana
 - c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa
 - d. Pembinaan Pelaksana Kegiatan
- 3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gupolo
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian Adalah letak dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Lokasi dipilih karena memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam hal pemberdayaan masyarakat sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas salah satu sumber pendanaan pada sektor pemberdayaan yaitu Alokasi Dana Desa.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian yang peneliti ambil adalah pada Kantor Pemerintahan Desa Gupolo .

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2014:292) sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, sumber data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Pertama kali terjun kelapangan, dalam menentukan sumber data maka memilih orang yang memiliki otoritas pada objek yang diteliti atau dianggap mampu dalam memberikan informasi yang akan dikumpulkan oleh peneliti.

Sumber data sendiri menurut Loufland dalam Moleong (2000:112) terbagi menjadi dua yaitu kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Sehingga jika ditarik kesimpulan ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder berdasarkan hal tersebut, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Sumber data utama atau primer

Sumber data diperoleh oleh peneliti secara langsung dalam melakukan penelitian, obyek penelitian meliputi observasi (pengamatan) dan melalui wawancara mendalam dengan orang atau pihak-pihak yang memiliki otoritas maupun yang mampu memberikan informasi secara detail kepada peneliti terkait efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Gupolo, sekretaris, Bendahara PKK, Tim Penggerak PKK, dan organisasi terkait seperti BPD dan Karangtaruna di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber data tambahan atau sekunder

Sumber data ini diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan lain. Peneliti memerlukan data tambahan ini untuk membantu proses penelitian. Diantaranya Profil Desa Gupolo, proses pengelolaan alokasi Dana Desa serta dokumen yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tentang Alokasi Dana Desa, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des).

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:293), teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti mendapatkan data yang akan dibutuhkan. Adapun dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya atau triangulasi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:226) bahwa, observasi dasar semua ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Berdasarkan pernyataan hal tersebut, dapat disimpulkan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar peneliti dapat meneliti obyek atau situasi sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi terstruktur. Sehingga dalam observasi terstruktur, sumber data yang berupa foto dan dokumentasi akan dapat mengetahui adanya kegiatan penelitian ini dari awal sampai akhir yang dilakukan peneliti.

2. Wawancara

Wawancara digunakan dalam penelitian sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tapi tidak menutup kemungkinan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:231) bahwa, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:232) yang menyimpulkan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Peneliti selanjutnya melaksanakan dialog dan tanya jawab secara langsung dengan pihak pihak yang terkait seperti Kepala Desa Gupolo (bapak Bashori), sekertaris Desa Gupolo (Bapak Muhajir), Bendahara PKK Desa Gupolo(Ibu titik Wahyuni), Tim Penggerak PKK Desa Gupolo(Ibu Siti Badriyah), dan organisasi terkait seperti BPD (Bapak Mulyani) yang kesemuanya ada di desa Gupolo

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data, atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari instansi, kantor, atau tempat yang telah ditetapkan menjadi lokasi penelitian. Data tersebut berupa RPJMdes dan RKPD

F. Instrumen Penelitian

Ada dua macam hal yang dapat mempengaruhi kualitas suatu penelitian diantaranya adalah kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2014:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Oleh sebab itu, maka kehadiran peneliti di lapangan merupakan sebuah kewajiban dan peneliti dalam menjadi alat instrumen tentunya harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu memotret, bertanya, menganalisa dan mengkonstruksi permasalahan sosial yang diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan instrumen berupa alat bantu seperti Pedoman wawancara, recorder, camera serta alat tulis menulis.

G. Metode Analisis

Peneliti menggunakan metode analisis Miles and Huberman, sehingga aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut antara lain, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing* atau *verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin peneliti ke lapangan maka jumlah data yang diperoleh juga akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data juga

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data yang sesuai dengan judul peneliti tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dlam Pemberdayaan Masyarakat.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Bentuk yang sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data juga dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat dan memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

3. *Conclusion Darwing* (Panarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan berkemungkinan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi kesimpulan awal juga dapat bersifat permanen jika didukung oleh bukti-bukit yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap awal yang dilaksanakan peneliti adalah pertama, melakukan proses pemilihan,

penyederhanaan dan transpormasi data mentah mana saja yang akan dipergunakan sebagai bahan penulisan, serta peneliti lebih menyederhanakan data mentah dengan cara diolah menjadi inti permasalahan yang diteliti. Kedua, peneliti melakukan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan dengan cara dari data mentah yang didapat dari peneliti, maka peneliti membuat data tersebut ke dalam bentuk yang sistematis dan mengubahnya ke dalam bentuk laporan peneliti agar dapat ditarik kesimpulan demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketiga, peneliti membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan lapangan dengan maksud agar data yang diperoleh valid, dengan cara peneliti mengelolah data yang tadinya sudah dari narasumber berupa catatan-catatan diolah menjadi lebih terperinci dan jelas dengan cara mengubah laporan kebentuk yang lengkap beserta kesimpulan sehingga penelitian bisa lebih va

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gupolo

a. Geografis Dan Sejarah

Desa Gupolo adalah desa yang tergolong tidak terlalu besar di wilayah Kecamatan Babadan. Di Desa yang berpenduduk 2.556 jiwa ini terletak pada orbitasi 5 km sebelah utara Ibukota Kabupaten Ponorogo. Penduduk Desa Gupolo rata rata berkerja sebagai petani dan wiraswasta non formal dan formal. Desa Gupolo terletak di sebelah utara ibukota Kabupaten Ponorogo pada jalur Ponorogo-Magetan, atau barat daya dari ibukota Kecamatan Babadan. Batas-batasan geografisnya adalah :

- a) Utara : Desa Polorejo,
- b) Timur : Desa Japan, Polorejo
- c) Selatan : Desa Ngunut
- d) Barat : Desa Ngunut

Bila dikaji secara seksama, mulai berdirinya Desa Gupolo hingga sekarang, awalnya Desa Gupolo didirikan berdasarkan aturan tradisional yang menganut sistim kerajaan dan kolonialisme. Namun lama- kelamaan berubah

dengan sendirinya dengan mengikuti perkembangan jaman yaitu mengikuti aturan pemerintah Pusat seperti desa-desa yang lain di Indonesia.

Dan perlu diketahui bahwa perkembangan Desa Gupolo sendiri baru kelihatan menonjol pada tahun 1967, Dan dalam perkembangannya pada tahun 2004 Desa Gupolo pernah mengikuti lomba Desa tingkat Kabupaten Ponorogo mewakili peserta tingkat Kecamatan Babadan dan memperoleh predikat juara 2 untuk selanjutnya pada tahun 2006 ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk mengikuti lomba Desa tingkat Propinsi Jawa timur dan memperoleh predikat katagori 10 besar desa terbaik tingkat Propinsi Jawa Timur.



Gambar 1. Kantor Desa Gupolo

Sumber : Observasi Peneliti

Desa Gupolo adalah desa terkecil di wilayah Kecamatan Babadan dan tidak banyak memiliki pendapatan asli desa atau PAD juga masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau penggarap sawah yang

tentunya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang sangat kurang.

Pada tahun 1982 yang waktu itu awal mula perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Gupolo dengan adanya Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri dimana dengan adanya program tersebut dan peserta pertama di wilayah Kecamatan Babadan yang berkerja di luar negeri khususnya Negara Arab dan dalam perkembangannya akhirnya mayoritas masyarakat Desa Gupolo banyak yang berkerja di luar negeri dengan demikian secara pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Gupolo tingkat kesejahteraan dan perekonomiannya meningkat sangat pesat, sehingga secara umum, dengan pesatnya pembangunan merubah wajah desa Gupolo menjadi lebih baik

Sejarah pemerintahan Desa Gupolo tidak bisa tercatat dengan sempurna akibat dari sumber-sumber yang didapat sangatlah terbatas. Adapun para pejabat yang memangku jabatan sebagai kepala desa, bisa ditelusuri lewat penuturan lisan dari tetua adat yang masih hidup. Nama nama kepala desa yang pernah menjabat sejak berdirinya Desa Gupolo adalah sebagi berikut

Tabel 2. Sejarah Kepemimpinan Desa Gupolo

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Gondosentono	1807	
2	Sorejo	1807-1900	

3	Joyodikromo	1900-1904	
4	Amatrejo	1905-1912	
5	Darsin	1912-1913	
6	Kasanwiryo	1913-1914	
7	Karyoharjo	1914-1917	
8	Kromharjo	1917-1967	
9	Moch Ichsan	1967-1979	
10	Suharno	1980-1990	
11	Ihwan Afudin	1990-1998	
12	Arifudin	1998-2006	
13	Basuki Romdon	2007-sekarang	

Sumber : Data Monografi Desa Gupolo 2017

Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan desa dan untuk mengendalikan administrasi Desa dibantu oleh seorang juru tulis yang disebut carik atau sekarang berubah menjadi Sekertaris Desa. Sedangkan di Desa Gupolo yang dapat diketahui jabatan carik atau sekertaris Desa tersebut yang menjabat sebagi berikut.

Tabel 3. Sejarah Kepemimpinan Sekertaris Desa Gupolo

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Soeriwidjoyo	-1920	
2.	Sastrosoemato	1920-1971	
3.	Koesnan Sadjid	1971-2003	
4.	Muhajir	2004-sekarang	

Sumber : Data Monografi Desa Gupolo 2017

Selain dibantu seorang carik sebagai pengendali administrasi pemerintahan Desa dalam meajukan Desa gupolo baik di Bidang administrasi maupun lapangan tidak tidak mungkin akan dapat berjalan dengan lancar tanpa dibantu oleh Pamong (perangkat desa) yang lain.

Sebagi penghasilan kepala desa dan pemahtunya adalah berupa tanah sawah (bengkok) dengan pembagian luas tidak sama yaitu menurut besar kecilnya tanggung jawab masing masing pada waktui telah dibicarakn dengn wakil masyarakat desa yang diwakili oleh mereka yang wajib memilih bekel (Kepala Desa). Dalam tata letak desa gupolo memiliki dua pedukuhan yaitu

1. Gupolo kulon
2. Gupolo wetan

Tanah bengkok umumnya berada di dukuh gupolo kulon yang keadaan topografinya masih banyak yang berupa lahan persawahan sementara pusat pemerintahan dan perumahan penduduk berada di gupolo wetan.

Seiring dengan perkembangan jaman desa gupolo telah berungkali mengalami perubahan masalah sistem penyelenggaraan pemerintahan maupun besar kecilnya penghasilan dikarenakan tuntutan jaman. Panjangnya uraian diatas tentang historis pemerintaha dessa yang terjadi di desa Gupolo, setidaknya memberikan warna dasar terciptanya pemerintahan yang terjadi pada masa lalu hingga sekarang.

b. Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memeberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian maslah di masyarakat.

Jumlah penduduk di desa gupolo adalah 2556 jiwa sesuai dokumen kartu keluarga yang ada di Desa Gupolo dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Gupolo Tahun 2017 Menurut Jenis Kelamin

No	Dukuh	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	%
		P	L	Total		
	Gupolo	599	649	1242	390	48
	Wetan					

	Gupolo	668	646	1314	406	52
	Kulon					
Total		1267	1289	2556	796	100

Sumber : Data Monografi Desa Gupolo 2017

Melihat dari jumlah tersebut maka ke depa perlu dipikirkan pengelolaan tata ruang wilayah dan penyediaan lapangan pekerjaan yang idela bagi selarasnya kehidupan bermasyarakat. Dengan semakin besarnya jumlah penduduk maka tantangan aparatur desa dalam mengelola pemerintahan desa tentunya akan semakin meningkat maka diperlukan peningkatkan pelayanan pelayanan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan pembangunan fisik seperti akses jalan yang baik, polindes, slauran irigasi dan sebagainya. Selain itu pembangnan non fisik juga sangat diperlukan untuk menunjang sinergi pelayanan pemerintahan seperti aparatur desa yang berpihak kepada masyarakat dan memiliki kompetensi, tenaga medis desa, penciptaan kader kader pembangunan desa, kelompok tani unggulan, kelompok usahawan desa dan sebagainya.

c. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Gupolo. Seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma Wanita, Posyandu, Kelompok arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaina informasi dalam setiap proses pembanguan desa.

Tabel 5. Data Kesejahteran Warga Desa Gupolo

Sumber : Data Monografi Desa Gupolo 2017

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	796 KK
2.	Jumlah penduduk miskin	80 KK
3.	Jumlah penduduk sedang	541 KK
4.	Jumlah penduduk kaya	175 KK

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Kerja

NO	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk Usia 15 s/d 55 yang belum berkerja	87 orang
2	Jumlah angkatan kerja Usia 15 s/d 55 tahun	75 orang

Sumber : Data Monografi Desa Gupolo 2017

1. Seni Budaya

- a. Orkes Kontemporer : 2 Perkumpulan
- b. Hadroh : 2 Perkumpulan
- c. Seni Racun : 2 Perkumpulan

2. Keagamaan

- a. Sarana prasarana
 - Masjid : 9 Buah

1. KH. Abdul Hadi : Dukuh Gupolo Wetan
2. Baitul Janah : Dukuh Gupolo Kulon
3. Mujahidin : Dukuh Gupolo Kulon
4. Nurul Hidayah : Dukuh Gupolo Kulon
5. Nurul Islam : Dukuh Gupolo Kulon
6. Arrohmah : Dukuh Gupolo Wetan
7. Baitur Rohman : Dukuh Gupolo Wetan

d. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk di Desa Gupolo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gupolo Tahun 2107

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Desa	12 Orang
2	Guru/PNS	14 Orang
3	TNI/POLRI	17 Orang
4	Pensiunan TNI POLRI	8 Orang
5	Petani	174 Orang
6	Wiraswasta/Pedagang	1097 Orang
7	Buruh Tani	230 Orang

8	Tukang Kayu	12 Orang
9	Tukang Batu	15 Orang
10	Tukang Jahit	6 Orang
11	Tukang Cukur	5 Orang
12	Pegawai Swasta	8 Orang
13	Pengangguran	12 Orang
Jumlah		1610 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Gupolo 2017

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Gupolo bergerak di bidang wiraswasta dan pertanian. Permasalahan yang sering muncul adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil, pemeberian kredit sebagai modal pengembangan usaha khususnya di Bidang perdagangan.

Tingkat angka kemsiskinan di Desa Gupolo yang relatif sedang menjadikan desa Gupolo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan sumber daya manusia yang ada di di desa Gupolo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur utama

transportasi yang mempertemukan 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Ponorogo, Madiun, Trenggalek dan Wonogiri.

e. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri. Dimana kemandirian dan perkembangan pembangunan harus berdampak perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Parasaran Kesehatan

- | | |
|-----------------|-----------|
| a. Posnyandu | : 3 Unit |
| b. Lansia | : 1 Unit |
| c. Posbindu | : 1 Unit |
| d. Polindes | : 1 Unit |
| e. Bidan Desa | : 1 Orang |
| f. Perawat Desa | : 1 Orang |

2. Parasarana Pendidikan

- | | |
|--------------------------|----------|
| a. Taman kanak-kanak/ TK | : 3 Unit |
| b. SD / MI | : 2 Unit |
| c. SLTP/ MTs | :- |
| d. SLTA / MA | :- |
| e. TPA/ TPQ | : 2 Unit |

3. Parsarana Umum lainnya

- | | |
|------------------|-----------|
| a. Tempat Ibadah | : 12 Unit |
|------------------|-----------|

- b. Lapangan Olahraga : 1 Unit
- c. Gedung Serbaguna :-

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah :

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama proses pembangunan
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokrasi sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
- c. Kapasitas pemerintah daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dan pendampingan.

- d. Keberadaan fasilitator /konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

f. Keuangan Desa Gupolo

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Penerimaan Pendapatan Desa terdiri dari :

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah,
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa
3. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun kekayaan desa terdiri dari

- a. Tanah Kas Desa
- b. Bangunan Desa yang dikelola Desa
- c. Lain lain kekayaan milik Desa

Desa Gupolo penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani dan mayoritas memeluk agama islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

g. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Gupolo mempunyai luas sebesar 125,672 Ha. Desa gupolo terdiri dari 2 (dua) dukuh yaitu : dukuh Gupolo Wetan dan dukuh Gupolo Kulon. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Gupolo terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, kaur Pemerintahan, Kaur Pelaksana Teknis dan 4 Kepala dusun. Desa Gupolo terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 8. Kondisi Wilayah Desa Gupolo Tahun 2017

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 125,672 ha	
2	Jumlah Dukuh RT/RW 1). Dukuh Gupolo Kulon: 3 RW, 8 RT 2). Dukuh Gupolo Wetan: 3 RW, 8 RT	
3	Batas Wilayah a. Utara : Desa Polorejo-Desa Lembah b. Timur : Desa Polorejo-Kel.Keniten c. Selatan : Kel. Keniten- Desa Ngunut d. Barat : Desa Ngunut – Desa Polorejo	

Sumber : Data Monografi Desa Gupolo 2017

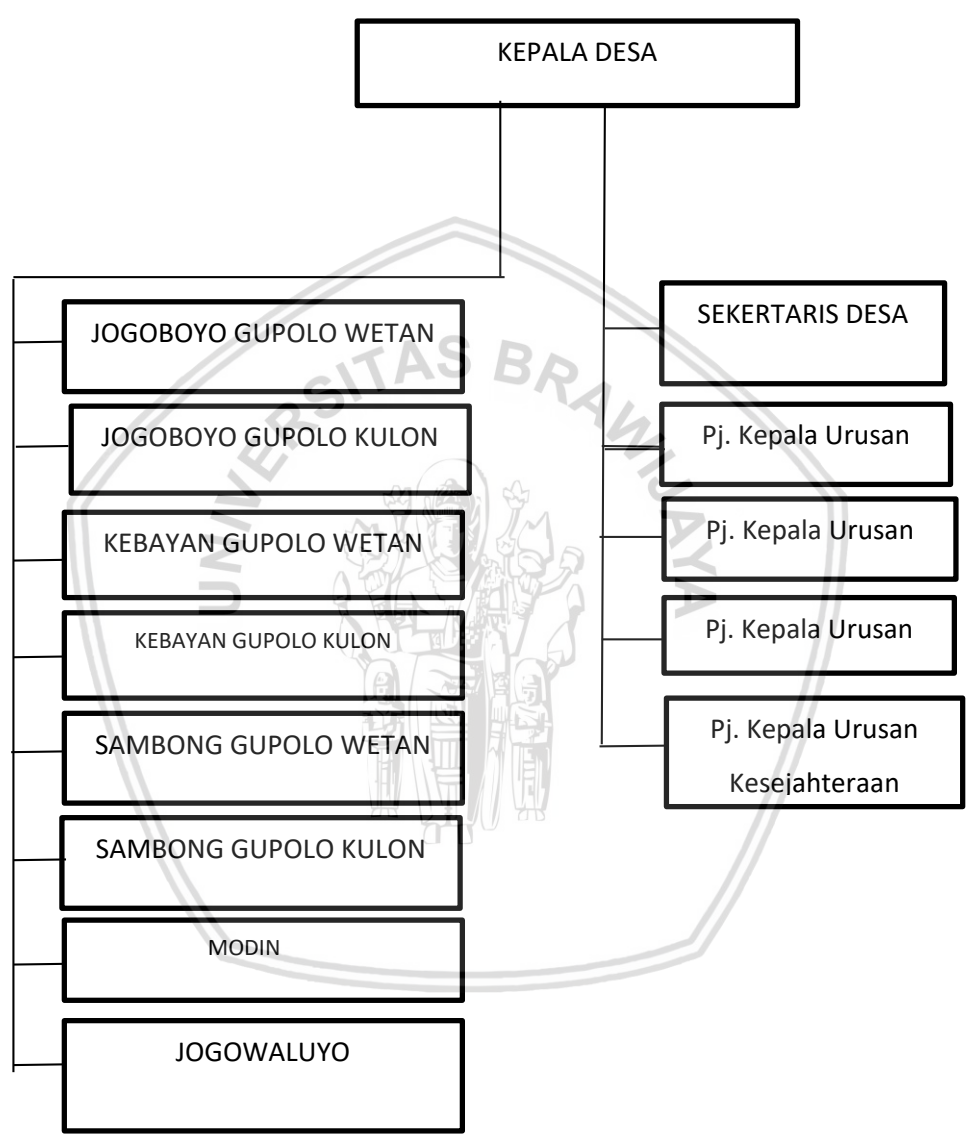
h. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan

nama lain Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

i. Struktur Pemerintahan Desa Gupolo



Sumber : Data Monografi Desa Gupolo 2017 (diolah peneliti)

B. Penyajian Data Dan Fokus Penelitian

1. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan

a. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1) Perencanaan Alokasi Dana Desa

Proses pertama dari mekanisme pengelolaan ADD adalah perencanaan. Sebagai wadah dalam melakukan perencanaan penggunaan ADD maka dilakukanlah kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrembangdes). Kegiatan pelaksanaan musrembangdes ini melibatkan semua unsur yang ada di dalam masyarakat antara lain RT, RW, BPD, LKMD, Karang Taruna, PKK dan lembaga lembaga lainnya yang ada di lingkup desa.

Peneliti melaksanakan wawancara secara komprehensif terkait Pengelolaan ADD kepada Bapak Muhajir selaku sekretaris desa Gupolo. Bapak Muhajir menjawab dan menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pengelolaan ADD dimulai dari tahapan pertama perencanaan anggaran melalui kegiatan musrembangdes.

“ ...Jadi Tahapan pertama dalam proses perencanaan penggunaan ADD ini diawali dengan kegiatan musrembangdes, dimana seluruh usulan warga dan lembaga kami terima untuk kemudian kami susun skala prioritasnya. Usulan dari warga itu bermacam macam mas, jadi tidak mungkin kami tampung semua untuk direalisasikan. Jadi semua usulan itu kami seleksi agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Desa Gupolo Terkini. *(wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)*

Keterangan Dari Bapak Muhajir selaku sekertaris Desa Gupoolo ini diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Titik Wahyuni seorang Warga RT 1 RW 1 Desa Gupolo selaku bendahara Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mengatakan kepada peneliti bahwa :

“Memang Benar mas bahwa Seluruh perwakilan lembaga yang ada di Desa diundang untuk melaksanakan kegiatan Musrembang, selain perwakilan lembaga ada perwakilan warga dari masing masing RT yang diundang untuk menghadiri musrembangdes. Tapi yang perlu dicatat oleh mas.bahwa sebelum diadakan musrembang masing masing RT diberi blangko untuk digunakan dalam menyampaikan aspirasi mulai dari pembangunan infrastruktur sampai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Semua aspirasi itu ditampung oleh pemerintah desa dan mereka pula yang akan menentukan skala prioritasnya dan pos posnya. *(Wawancara dilakukan pada Tanggal 6 Februari pukul 20.00 bertempat dirumah narasumber)*

Melalui acara musrembangdes maka seluruh kebutuhan dari masyarakat yang dihimpun dari lembaga desa maupun masing masing RT dihimpun dan dimusyawarahkan. Musyawarah itu nantinya akan menghasilkan skala prioritas dari kegiatan maupun program yang akan dijalankan satu tahun anggaran ke depan. Proses selanjutnya yang ada dalam perencanaan adalah memasukan masing masing kegiatan tersebut ke dalam pos pos yang tersedia sehingga bisa diketahui suatu kegiatan atau program akan menggunakan dana desa yang mana.

Untuk skala prioritas daripada musrembangdes tahun 2017, Desa Gupolo mempunyai fokus terhadap Pembangunan infrastruktur Desa dan Pemberdayaan masyarakat. hal ini diungkapkan oleh bapak Muhajir sebagai sekertaris Desa yang dalam wawancara dengan meneliti menyatakan bahwa :

“....pada Tahun 2017 ini Fokus ADD memang terserap banyak untuk pembangunan Infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan semangat pemerintah pusat kan mas yang akhir akhir getol melaksanakan pembangunan fisik dan masyarakat secara beriringan. Namun karena jumlah dana yang tersedia relatif kecil maka sebisa mungkin kami optimalkan pengelolaannya. Terlepas dari belum maksimalnya kegiatan maupun program yang sudah berjalan maka kami selaku pemerintah sebenarnya sudah berusaha. (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Rangkaian kegiatan musrembangdes tidak selesai begitu saja dengan terlaksananya pertemuan antara warga dan lembaga desa untuk merencanakan pembangunan desa karena setelah itu terdapat tahapan untuk mensosialisasikan hasil dari musrembangdes kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini tidak kalah penting untuk memberikan informasi yang transparan mengenai fokus penggunaan ADD di desa Gupolo.

Bapak Muhajir dalam wawancara dengan peneliti mengungkapkan fakta tentang kegiatan musrembangdes yang tidak berhenti pada tahapan pertemuan saja. Sekertaris desa Gupolo ini mengatakan bahwa :

“ kegiatan musrembangdes ini tidak hanya sebatas pertemuan. Setelah itu kami mempunyai tugas untuk melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat . karena warga yang hadir sekalipun kadabng masih belum terlalu paham dengan arah dari musrembangdes beserta fokus fokusnya. Kita punya banyak cara berkaitan dengan sosialisasi hasil dan keputusan dari musrembangdes, salah satunya dengan mencetak baner yang berisi hasil dan keputusan musrembangdes untuk selanjutnya dipasang pada tempat tempat strategis di desa Gupolo agar masyarakat dapat mengetahuinya dengan mudah. Kedua kami biasanya membuat surat edaran yang berisi salinan hasil dan keputusan musrembangdes untuk dikirim ke setiap RT yang mana akan dibacakan pada kegiatan arisan rutin di masing masing RT. . (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Dari pernyataan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kegiatan musrembangdes merupakan sebuah rangkaian kegiatan berkumpulnya perwakilan dari seluruh elemen masyarakat untuk memberikan usulan terkait dengan pembangunan desa selama satu tahun ke depan. Seluruh usulan yang masuk akan ditampung untuk selanjutnya diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat karena tidak semua usulan yang masuk dapat direalisasikan sehubungan dengan adanya peraturan dalam pedoman teknis pelaksanaan ADD . Untuk Tahun 2017, anggaran ADD desa Gupolo difokuskan untuk menjalankan pemerintahan desa dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat. Tahapan selanjutnya daripada kegiatan musrembangdes ini adalah sosialisasi terkait hasil musrembangdes yang tertuang dalam bentuk RKP dan dilaksanakan melalui media pemasangan baner dan penyebaran surat ke masing masing RT.

Gambar 3. Baner Sosialisasi ADD di Desa Gupolo



Sumber : (Observasi Peneliti di Desa Gupolo)

2) Penganggaran

Tahap lanjutan dari pengelolaan ADD adalah penganggaran. Penganggaran dilaksanakan oleh pemerintah desa dimana rencana kebutuhan masyarakat desa yang telah disusun dalam musrembangdes akan dinyatakan dalam skala keuangan. Peneliti melalui wawancara dengan Bapak Muhajir selaku sekretaris Desa Gupolo mengetahui sebuah fakta sebagai berikut:

“sebelum melakukan yang namanya kegiatan penganggaran biasanya kami akan melakukan survey berkaitan dengan besaran harga kebutuhan yang akan kita belanjakan. Harganya biasanya fluktuatif tergantung dengan kondisi pasar sehingga kami tidak dapat menetapkan acuan pasti, jadi selalu dinamis dan fleksibel. Tapi pemerintah desa Gupolo berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas dalam setiap penganggaran baik dalam barang dan jasa agar masyarakat dapat puas dengan pemerintah desa.(wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Bapak Muhajir juga menyatakan bahwa dalam proses penganggaran ini harus dilaksanakan dengan acuan dasar berupa harga satuan yang berlaku. Hal ini digunakan baik dalam pengadaan barang dan jasa. Angka yang tertuang Dalam RKPD yang tertulis dalam penganggaran ini harus sesuai dengan yang ada pada proses pertanggungjawaban nanti. Pendapat ini diperkuat dengan wawancara dengan Kepala Desa yaitu bapak Bashori sebagai berikut :

“... saya sudah instruksikan kepada jajaran saya bahwa proses penganggaran harus dilaksanakan dengan cermat supaya tidak ada kekeliruan. Semisal gini mas , kita belanja operasional berupa mesin elektronik katakanlah laptop. Sebelumnya kita mesti harus tahu dulu mulai dari spesifikasi har

dware maupun softwarena. Jangan sampai dengan budget yang besar kita hanya dapat barang yang dibawah standar. Kalau semisal nanti ada pengawasan dari atas ya kita bisa kena mas. (wawancara dilakukan pada Tanggal 6 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Seluruh Hasil dari penganggaran ADD tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Gupolo (RKPD). Adapun RKPD desa Gupolo tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 . Rekapitulasi Rencana Penggunaan ADD Desa Gupolo**Tahun Anggaran 2017**

No	Bidang Jenis Kegiatan		Perkiraan Biaya		Waktu
	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Belanja pegawai dan operasional pemerintah	Penghasilan tetap & tunjangan kades, perangkat desa	Rp.178.350.000	ADD&PAD	
		Tunjangan BPD	Rp. 15.600.000	ADD	
		Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Rp.8.000.000	ADD	
		Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Rp.105.948.480	ADD+PAD	
		Kelengkapan profil Desa	Rp. 1.900.000	ADD	
2	Belanja Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp.15.882.000	ADD+PAD	
		Meningkatkan kinerja PKK	Rp.17.067.500	ADD	
		Pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana	Rp.1.500.000	ADD	

		Meningkatkan SDM PLK	Rp.1.730.000	ADD	
		Meningkatkan SDM kapasitas masyarakat	Rp.6.145.000	ADD	
	Total Dana	Rp. 352.122.980			

Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggaran 2017 (Diolah Peneliti)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, Anggaran ADD Desa gupolo berjumlah Rp. 339.386.000. dari keseluruhan alokasi dana desa yang diterima oleh desa Gupolo maka penggunaanya dibedakan menjadi dua pos besar yaitu belanja Pemberdayaan dan belanja pegawai atau operasional pemerintahan desa. Jumlah dana untuk pemberdayaan adalah sebesar Rp.28.030.700 sementara untuk belanja pegawai dan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 309.798.480.

Melalui tabel yang telah peneliti cantumkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kegiatan belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan desa, meningkatkan kinerja PKK, meningkatkan program keluarga sejahtera, meningkatkan SDM PTPKD dan TPK serta meningkatkan SDM masyarakat. Sementara itu Penggunaan ADD terlihat lebih besar pada Belanja pegawai dan operasional pemerintah desa yang antara lain terkait dengan Peningkatan kinerja KADES dan perangkat desa, Peningkatan Kinerja BPD, Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat , Penetapan arah Kebijakan Desa serta, Pembuatan kelengkapan profil Desa.

Berdasarkan fakta yang telah ditemukan peneliti dari kedua narasumber diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa proses penganggaran selalu didasarkan pada rencana penggunaan dana yang telah disepakati di awal pada kegiatan musrembangdes untuk selanjutnya dihitung dalam skala keuangan. Sebelum dihitung dalam skala keuangan maka pihak pemerintah desa melaksanakan survey terlebih dahulu untuk mengetahui harga barang atau jasa yang akan dibelanjakan. Proses penganggaran ini dilaksanakan dengan cermat dan penuh perhitungan karena penggunaan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

3) Penatausahaan

Tahapan kedua setelah penganggarn adalah tahap penatausahaan. Didalam proses penatusahaan terdapat kegiatan penyaluran dan pencairan ADD. Khusus untuk pencairan ini telah diatur dalam Peraturan Bupati No.14 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran.2017 Kelengkapan berkas pencairan yang harus dilengkapi antara lain sebagai berikut.

- a) Surat pengantar dari camat
- b) Surat permohonan kepala desa
- c) Kwitansi bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah) sebanyak tiga lembar
- d) Laporan penggunaan ADD tahun sebelumnya
- e) Rekapitulasi rencana penggunaan dana (RPD) tahap I dan II

- f) Rincian RPD masing masing kegiatan
- g) Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala Desa bermetrai 6000
- h) Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017
- i) Fotocopy buku rekening
- j) Fotocopy NPWP bendahara Desa
- k) SK tentang pengangkatan bendahara Desa tahun 2017

Peraturan Bupati tersebut didukung oleh pernyataan dari sekretaris Desa yaitu bapak Muhajir yang menyatakan :

“ anggaran ADD ini cairnya dibagi menjadi dua tahapan, yaitu sekitar bulan Juni dan September. Untuk penyerapan pertama ADD dapat cair ketika sudah ada surat rencana penggunaan, rincian penggunaan dana, sebelumnya pakta Integritas, Pertanggung jawaban dari penggunaan ADD sebelumnya. Kemudian kita akan menerbitkan surat pengantar pengajuan pencairan melalui kecamatan. Setelah itu ada rekapitulasi persyaratan yang telah kita siapkan tadi dari pihak kecamatan. Setelah ADD itu cair maka kita akan lagi muswarah dengan masyarakat sesuai musrembangdes. (wawancara dilakukan pada Tanggal 9 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Melalui wawancara dengan narasumber diatas maka hal hal yang berkaitan dengan persyaratan haruslah dilengkapi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pencairan dan ADD. Persyaratan yang harus dilengkapi antara lain, rekapitulasi rencana penggunaan dana, rincian rencana penggunaan dana. Pakta integritas, pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya, dan surat permohonan pencairan ADD dari kepala Desa kepada Camat. Setelah itu pemerintah desa juga

harus bermusyawarah dengan Masyarakat pasca pencairan ADD agar sesuai dengan rencana proiritas yang telah disepakati di perencanaan penggunaan anggran.

Pasca pencairan dana ADD, maka musywarah yang diadakan oleh pemeritah desa harus setidaknya melibatkan unsur RT,RW,LKMD,PKK dan lembaga lembaga lain di Desa Gupolo. tujuan utama dari musyawarah ini berupa pembahasan tentang persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan didanai oleh ADD sesuai rencana Penggunaan Dana yang telah dibuat.

4) Pelaporan

Pelaporan kegiatan penggunaan dana dalam bentuk tulisan merupakan sebuah kewajiban bagi instansi pemerintah tidak terkecuali pemerintah desa. Dalam sistem pemerintahan desa bendahara desa merupakan aparatur desa yang mempunyai kewajiban untuk membuat sebuah laporan tentang penggunaan dana yang sudah terjadi. Didalam setiap pengeluaran yang menggunakan ADD laporan dibagi menjadi dua bentuk yaitu pelporan berkala dan laporan akhir dari penggunaan ADD. Laporan berkala merupakan bentuk laporan yang dibuat rutin dalam setiap bulannya yang berisi tentang realisasi penerimaan serta belanja ADD. Sementara laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan. Masalah yang ditemui serta masukan dalam penyelesaian.

Melalui wawancara dengan peneliti, Bapak Muhajir yang memangku jabatan sebagai sekretaris desa Gupolo menjelaskan tata cara pelaporan keuangan sebagai berikut.:

“.....Begini mas jadi pengeluaran yang sudah terjadi wajib disertai dengan laporanya. Laporan ini nantinya akan berwujud sebagai pertanggungjawaban kami atas suatu kegiatan yang sudah didanai melalui ADD. Laporan pertanggungjawaban ini yang nantinya akan menjadi syarat untuk mecairkan dana ADD periode berikutnya. Penulisan laporan ini juga menyertakan kwitansi pengeluaran dan Dokumnetasi kegiatan juga. (wawancara dilakukan pada Tanggal 9 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Pendapat bapak Muhajir ini diperkuat oleh bapak Sutrisno Yang merupakan Bendahara Desa Gupolo. Untuk Pelaporan penggunaan ADD ini beliau mengemukakan pendapat sebagai berikut.

“pasca selesainya kegiatan yang bersumber dana dari ADD maka saya akan langsung membuat laporan kegiatannya. Laporan yang saya buat setidaknya memuat beberapa point penting antara lain: Bagaimana keadaan kegiatan tersebut, bukti pembayaran, dan yang tak kalah penting adalah dokumnetasi lapangan dari kegiatan tersebut. Setelah saya susun rapi maka laporan ini siap untuk dijadikan pertanggungjawabn. Pertanggungjawaban ini akan jadi salah satu syarat pecairan ADD untuk tahun selanjutnya. (wawancara dilakukan pada Tanggal 16 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Melalui hasil dari wawancara dari dua narasumber terkait maka dapat dijelaskan bahwa sistem pelaporan yang ditemui di lapangan merupakan kegiatan menulis laporan secara sitematis tentang pengeluaran baik kegiatan pemberdayaan maupun belanja operasional pegawai yang bersumber dari ADD. Sebagai bukti pelengkap dalam penulisan laporan maka disertakan pula bukti kwitansi atau pembayaran dan dokumnetasi foto kegiatan.

5) Pertanggungjawaban

Sistem palaporan kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah bendahara desa nantinya akan menjadi pertanggungjawaban penggunaan dana ADD. Bapak muhajir selaku sekretaris desa menjelaskan :

“ seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya bahwa laporan yang kita susun setelah melaksanakan kegiatan yang didanai ADD nantinya kan menjadi laporan petanggungjawaban. Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD ini dilaksanakan dua kali dalam setahun mengikuti periode dari pencairan ADD. Sementara untuk laporanya memannng harus setelah kegiatan usai. (wawancara dilakukan pada Tanggal 16 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Pendapat bapak muhajir sendiri didukung oleh Bapak Basuki sebagai kepala Desa Gupolo yang menyatakan bahwa :

“...pertanggungjawaban ADD dilaksnakan dua kali dalam satu tahun mengikuti pencairan ADD yang juga dibagi menjadi dua periode. Semisal ADD periode dua cair. Maka kita sebagai pemerintah desa akan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat untuk memberitahukan bahwa ADD periode ini cair sambil mealporkan pertanggungjawaban ADD periode satu atau periode sebelumnya. (wawancara dilakukan pada Tanggal 14 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Melalui dua narasumber diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban dilakukan selama dua kali setahun mengikuti mekanisme pencairan ADD yang juga dibagi menjadi dua periode dalam satu tahun anggaran.

6) Pengawasan

Proses lain yang tak kalah penting dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa adalah proses pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh

pihak inspektorat kabupaten Ponorogo dan juga BPD Desa Gupolo.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pengawasan ini bersifat pembinaan.

Bapak Basuki sendiri selaku kepala desa menyatakan bahwa :

“ Selama ini pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilaksanakan oleh pihak kabupaten. Setelah kita melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban, pihak inspektorat dari kabupaten akan mengecek ulang apakah laporan yang sudah kami tulis sesuai dengan rencana yang tercantum dalam perencanaan dana itu. Pihak inspektorat sendiri selalu memberikan pembinaan dalam Pengelolaan ADD agar selalu mengikuti petunjuk teknis yang sudah ditetapkan (wawancara dilakukan pada Tanggal 14 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Kegiatan pengawasan merupakan bentuk kontrol dari Kabupaten terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD. Pengawasan dilakukan dengan melihat ulang laporan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan digariskan dalam peraturan. Hal ini disampaikan juga oleh sekretaris desa Gupolo yaitu bapak Muhajir yang menyatakan bahwa. :

“... dalam proses pengawasan keuangan desa termasuk ADD didalamnya . selalu terdapat pembinaan terkait dari pihak inspektorat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Kalau perlu seluruh warga masyarakat mengetahui tentang pengelolanya” ditetapkan (wawancara dilakukan pada Tanggal 14 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

BPD sebagai lembaga yang berperan melaksanakan kontrol terhadap pemerintah Desa juga berperan dalam proses pengawasan. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah dengan memastikan apakah kegiatan yang sudah didanai oleh ADD sesuai dengan

apa yang disepakati pada saat perencanaan dan surat pertanggungjawaban.

Hal ini disampaikan oleh bapak Mulyani sebagai ketua BPD desa Gupolo

bahwa :

“...BPD tidak ikut campur dalam proses pengelolaan keuangan desa dimana hal itu merupakan hak dari pemerintah desa. Hanya saja kami ikut mengawasi penggunaannya. Melalui pertanggungjawaban yang telah dibuat maka kami selaku BPD akan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana penggunaan Dana” (*wawancara dilakukan pada Tanggal 20 Februari pukul 8 malam berlokasi di rumah bapak Mulyani*).

Melalui pengamatan peneliti di lapangan, bendahara desa sudah melaksanakan upaya yang maksimal dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terbukti dengan ditata rapinya inventaris pembukuan kas keuangan desa dan pengamatan secara mendalam pada surat pertanggung jawaban ADD b;btahun 2017

b. Penggunaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Pembinaan PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau yang selanjutnya disingkat menjadi PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan kaum wanita untuk turut serta dalam proses pembangunan masyarakat. Desa Gupolo dalam hal ini melaksanakan belanja anggaran yang bersumber dari ADD guna meningkatkan kinerja PKK melalui kegiatan pembinaan organisasi PKK. Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan pembinaan PKK mencapai Rp. 17.067.500. Adapun rician penggunaan dana ADD untuk pembinaan organisasi pemberdayaan wanita ini pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. :

Tabel 10. Rincian Perkiraan dan Realisasi Penggunaan ADD Tahun

Anggaran 2017 Pembinaan PKK		
NO	Uraian	Jumlah dana
1	Pengadaan ATK	Rp.1.052.500
2	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 1.440.000
3	Honorarium Tim Penggerak PKK	Rp. 2.450.000
4	Kegiatan 10 Program Pokok PKK	Rp. 12.125.000
Jumlah Total		Rp. 17.067.500
Realisasi Penggunaan		Rp. 16.656.000
Sisa		Rp. 411.500

*Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggaran 2017 (Diolah
Peneliti)*

Berdasarkan Data tabel diatas, menerangkan bahwa untuk tahun anggaran 2017 penggunaan dana ADD untuk melaksanakan pembinaan PKK adalah sebesar Rp. 17.067.500. Untuk pengadaan ATK sebesar Rp.1.052.500, untuk belanja makanan dan minuman sebesar Rp. 1.440.000. untuk honorarium tim penggerak PKK sebesar Rp. 2.450.000. dan tentu saja yang paling besar adalah untuk menyelenggarakan program pokok PKK yang jumlahnya mencapai Rp. 12.125.000.

Sepanjang Tahun 2017, kegiatan pembinaan organisasi PKK ini telah berjalan dengan rutin dan tertib. 10 program pokok PKK juga

dijalankan secara teratur. Ibu Titik Wahyuni selaku bendahara PKK mengatakan sebagai berikut :

“... dalam kurun waktu 2017 ini dana yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan pembinaan PKK memang berasal dari ADD. Secara pribadi saya mengakui jumlah alokasi anggaran yang kami terima sudah cukup sehingga kegiatan pembinaan PKK ini tidak mengalami hambatan dari segi finansial”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 februari pukul 7 malam dirumah ibu Titik Wahyuni)

Pendapat Ibu titik Juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Muhajir selaku sekertaris Desa Gupolo. Beliau mengatakan sebagai berikut.

“ ... seluruh anggaran yang akan dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan sudah kami perhitungkan dengan cermat sehingga jumlah dan porsinya dapat mendukung kesuksesan kegiatan tersebut. Salah satunya ya kegiatan pembinaan organisasi PKK ini. Itu semua sudah kami hitung yang penting semua bukti pengeluaran dicatat untuk pertanggungjawaban (wawancara dilakukan pada tanggal 21 februari pukul pagi bertempat di kantor desa Gupolo)

Berdasarkan pernyataan dari dua narasumber diatas yaitu ibu Titik Wahyuni sebagai Bendahara PKK dan Bapak Muhajir sebagai Sekertaris Desa. Dapat disimpulkan bahwa dana ADD yang dialokasikan untuk kegiatan Pembinaan PKK sudah tersalurkan dengan baik dan dalam jumlah yang proporsional. Hal ini juga terlihat dengan masih tersisnya anggaran sebesar Rp.411.500 yang mengindikasikan bahwasanya alokasi anggaran yang tersedia lebih dari cukup untuk menjalankan kegiatan. Jumlah alokasi anggaran yang mencukupi membuat kegiatan dapat

berjalan dengan lancar selama periode tahun anggaran 2017. Semua bukti tentang belanja anggaran nantinya akan dilampirkan dalam bentuk pertanggung jawaban kegiatan.

Hasil dari adanya kegiatan pembinaan organisasi PKK ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Hal ini sependapat dengan pernyataan ibu Titik Wahyuni sebagai berikut :

“...melalui kegiatan pembinaan organisasi PKK yang didanai dari ADD maka organisasi PKK desa Gupolo dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan wanita dan masyarakat. (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 februari pukul 7 malam di rumah ibu Titik Wahyuni)

Pendapat dari ibu Titik sebagai bendahara desa Gupolo dikuatkan lagi oleh bapak Basuki Romdhon selaku kepala Desa Gupolo. Yang menyatakan bahwa :

“...untuk kegiatan pembinaan organisasi PKK ini memang sudah diatur dalam rencana kerja pemerintah Desa atau RKPD. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kinerja PKK sebagai organisasi khusus pemberdayaan wanita. Selain itu alhamdulillah desa Gupolo ini kemarin baru saja menjuarai lomba PKK untuk tingkat Kabupaten dan Nomor Dua di tingkat Provinsi (wawancara dilakukan pada tanggal 21 februari pukul pagi bertempat di kantor desa Gupolo)

Berdasarkan pendapat diatas, maka penggunaan ADD untuk mendanai kegiatan pembinaan organisasi PKK ini perlu untuk meningkatkan kinerja organisasi PKK itu sendiri. Selain itu organisasi PKK yang baik dan mempunyai kinerja tinggi akan mendapat apresiasi baik dari masyarakat maupun pemerintah.

2) Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Berencana

Bentuk kegiatan lain dari pos pemberdayaan masyarakat di Desa Gupolo yang bersumber dari dana ADD adalah Pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana bertujuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil dan sejahtera. Kegiatan ini diadakan secara rutin dalam masa satu periode anggran dengan melibatkan kader dari pemeberdayaan dan pembinaan keluarga berencana yang biasanya adalah tenaga medis setara bidan dan masyarakat desa Gupolo. Adapun rincian penggunaan dana ADD untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan keluarga berencana adalah sebagai berikut. :

Tabel 11. Rincian Perkiraan dan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2017 Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga

NO	Uraian	Volume	Satuan Harga	Jumlah dana
1	Honoraium PPKBD	1	Rp.400.000	Rp. 400.000
2	Honorarium Sub PPKBD	4	Rp.275.000	Rp. 1.100.000
Total				Rp. 1.500.000
Realisasi Penggunaan				Rp. 1.500.000
Sisa				-

Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggaran 2017 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2017 pengalokasian ADD untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan keluarga berencana adalah sebesar Rp.1.500.000. dana ini terpakai untuk membiyai honorarium kepada kader PPKBD yang berjumlah satu orang sebesar Rp. 400.000 dan honor kepada subkader PPKBD yang berjumlah 4 orang dengan perincian Rp.275.000 per satu orang sehingga berjumlah total Rp.1.100.000. anggaran ini terserap habis tanpa sisa namun jumlah tersebut nyatanya masih terlalu kecil untuk dapat membuat kegiatan pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana berjalan secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Saodah selaku penanggung jawab kegiatan sebagai berikut :

“... dengan jumlah dana yang hanya sekitar Rp.1.500.000 per satu tahun masa anggaran maka bisa ditebak kalau kegiatan pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana ini tidak mungkin dapat berjalan secara optimal. Terpaksa dengan jumlah yang cuma segitu kami mengepas ngepaskan. Alternatifnya ya kegiatan ini hanya berkutat pada masalah sosialisasi tentang pentingnya kesehatan keluarga dan perencanaan kehamilan. Untuk penyediaan alat pendukung KB kami berkerjasama dengan pihak ketiga (wawancara dilakukan pada tanggal 18 februarai pukul 7 malam di rumah narasumber)

Melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana tersebut pemerintah desa Gupolo mengupayakan terwujudnya kesadaran akan pentingnya keluarga kecil dan sejahtera bagi masyarakat. Namun karena jumlah anggran ADD yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut masih kecil maka kegiatan pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana ini kurang dapat berjalan optimal. Secara tidak

langsung kecilnya jumlah alokasi dana membuat terhambatnya tujuan tujuan startegis dari kegiatan tersebut.

3) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa

Pemerintah desa Gupolo mempunyai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membina dan meningkatkan kapasitas masyarakatnya. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa Gupolo yang nantinya akan dapat berguna untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa penyuluhan dan sosialisai yang diadakan beberapa kali dalam satu tahun. dengan materi yang disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan terkini dari masyarakat desa Gupolo. Dalam pos anggran yang tercantum dalam RKP desa Gupolo kegiatan pembinaan dan Peningkatan kapasitas masyarakat Desa ini mendapat porsi anggran sebesar Rp.6.145.000 Berikut ini merupakan rincian penggunaan dana ADD untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa.

Tabel 12. Rincian Perkiraan dan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggran 2017 Pembekalan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

No	Uraian	Volume	Satuan Harga	Jumlah dana
1	Belanja Kursus/ pelatihan/ sosialisasi	1	Rp.2.000.000	Rp. 2.000.000
Total				Rp. 2.000.000

Penggunaan	Rp. 1.850.000
Sisa	Rp. 150.000

Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggaran 2017 (Diolah Peneliti)

**Tabel 13. Rincian Perkiraan Dan Realisasi Penggunaan ADD
Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum**

No	Uraian	Volume	Satuan Harga	Jumlah dana
1	Cetak dan Pengadaan Baner	1	Rp.100.000	Rp.100.000
2	Konsumsi	25	Rp.15.000	Rp.375.000
3	Honor pelatih dan narasumber	2	Rp.175.000	Rp.350.000
Total				Rp. 825.000
Realisasi Penggunaan				Rp. 825.000
Sisa				

Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggaran 2017 (Diolah Peneliti)

**Tabel 14. Rincian Perkiraan Dan Realisasi Penggunaan ADD Tahun
Anggaran 2017 Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak**

No	Uraian	Volume	Satuan Harga	Jumlah dana
1	Cetak dan Pengadaan Baner	1	Rp.100.000	Rp.100.000
2	Konsumsi	25	Rp.13.000	Rp.325.000

3	Honor pelatih dan narasumber	2	Rp.175.000	Rp.350.000
Total				Rp. 775.000
Realisasi Penggunaan				Rp.775.000
Sisa				-

Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggaran 2017 (Diolah Peneliti)

**Tabel 15. Rincian Perkiraan Dan Realisasi Rincian Penggunaan
ADD Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Sosialisasi Poskesdes**

No	Uraian	Volume	Satuan Harga	Jumlah dana
1	Belanja ATK	1	Rp.400.000	Rp.400.000
2	Konsumsi	4x 25 Orang	Rp.375.00	Rp.1.500.000
Total				Rp. 1.900.000
Realisasi Penggunaan				Rp. 1.812.000
Sisa				Rp.88.000

Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggran 2017 (Diolah Peneliti)

**Tabel 16. Rincian Perkiraan Dan Realisasi Penggunaan ADD Tahun
Anggaran 2017 Kegiatan Pelatihan Kader JUMANTIK**

No	Uraian	Volume	Satuan Harga	Jumlah dana
1	Cetak dan Pengadaan Baner	1	Rp.100.000	Rp.100.000
2	ATK	1 Paket	Rp.100.000	Rp.100.000
3	Konsumsi	35	Rp.7.000	Rp.245.000

3	Honor pelatih dan narasumber	2	Rp.100.000	Rp.200.000
Total				Rp. 645.000
Realisasi Penggunaan				Rp.622.000
Sisa				Rp 23.000

Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggaran 2017 (Diolah Peneliti)

Dari data tabel diatas, jumlah anggaran untuk kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa adalah sebesar Rp. 6.145.000 yang dibagi menjadi 5 sub kegiatan yaitu.

- a) Pembekalan peningkatan kapasitas kepala Desa
- b) Kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum
- c) Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak
- d) Kegiatan Sosialisasi Poskesdes
- e) Kegiatan Pelatihan Kader JUMANTIK

Dari setiap sub kegiatan diatas masing masing mendapatkan porsi anggaran yang berbeda beda tergantung dari harga kebutuhan barang dan jasa serta jumlah peserta yang mengikuti kegiatan. Melalui data tabel yang telah tercantum diatas juga dapat diketahui bahwa pembelanjaan anggaran digunakan untuk belanja Barang dan jasa seperti kebutuhan rapat dan narasumber, belanja ATK, serta Konsumsi. Berbagai belanja yang dikeluarkan menggunakan ADD tersebut berguna untuk mendukung kelancaran kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa

seperti yang dikemukakan oleh bapak Basuki Romdhon selaku kepala Desa Gupolo.

“... kegiatan kegiatan seperti sosialisasi atau pelatihan selalu membutuhkan unsur pendukung untuk dapat berjalan dengan lancar. Unsur pendukung bisa saja berupa materil atau perlengkapan barang bisa juga berupa tenaga ahli. Maka dari itu kami berusaha mencukupi kebutuhan akan unsur pendukung itu melalui alokasi anggaran yang sekiranya cukup. Pokoknya yang terpenting semua bisa berjalan lancar ” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 februarai pukul 9 siang di balai desa Gupolo)

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Basuki Romdhon selaku kepala desa Gupolo bahwa belanja kebutuhan pendukung kegiatan merupakan hal yang sangat penting dan dapat meperlancar kegiatan maka Bapak Muhajir selaku sekretaris Desa Gupolo juga mengatakan Bahwa :

“.. untuk setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Mulai dari jumlah anggaran sampai kebutuhan pendukung akan kami cukupi. Soalnya ini demi kepentingan bersama mas.” ” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 februarai pukul 10 siang di balai desa Gupolo)

Dapat disimpulkan berdasarkan keterangan dua narasumber diatas bahwa kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa Gupolo. Kegiatan ini menjadi sangat vital karena berhubungan dengan strategi pemerintah desa Gupolo untuk melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Harapan dari adanya kegiatan ini adalah masyarakat dapat terberdayakan sehingga kemandirian akan tercapai di berbagai sektor.

Kondisi di lapangan juga berbanding lurus dengan usaha pemerintah desa Gupolo untuk dapat semaksimal mungkin

menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa. Dengan besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini ternyata penilaian masyarakat juga menunjukkan tren yang positif. Penilaian tersebut salah satunya diungkapkan oleh seorang warga desa Gupolo, Ibu Siti Badriyah sebagai berikut :

“..iya saya memang pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh desa.waktu itu kalau tidak salah kegiatannya sosialisasi tentang pola asuh anak yang baik. Sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak balita kegiatan ini menurut saya sangat berguna. Materi yang disampaikan juga cukup bagus. Saya rasa pemateri yang di undang dalam kegiatan tersebut cukup berkompeten dalam bidang itu. Selain itu fasilitas selama saya mengikuti kegiatan itu juga cukup bagus. Satu lagi yang paling penting. Kegiatan itu tidak dipungut biaya sepeser pun.”

Pendapat Ibu siti badriyah juga dikuatkan oleh pendapat Ibu Endang Sumiyati sebagai berikut :

“Apik mas menurutku. Kegiatan sosialisasi yang diadakan desa itu pokoknya sering sering aja masyarakat diundang agar lebih tahu hal hal yang baru. Aku kemarin ikut kegiatan sosialisasi keluarga sadar hukum yang kasih materi Kapolsek mas. Jadi sistemnya kita bisa tanya tanya tentang masalah hukum yang belum kita tahu.

Sesuai dengan yang disampaikan dua informan diatas, menyimpulkan bahwa masyarakat merespon positif kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa tersebut. Walaupun kegiatan yang ada keseluruhan hanya sebatas sosialisasi tapi masyarakat sudah cukup puas dengan hal itu.

4) Pembinaan Pelaksana Kegiatan

Kegiatan pembinaan pelaksana kegiatan merupakan kegiatan khusus yang diadakan oleh pemerintah desa Gupolo dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan memiliki kapasitas untuk dapat sewaktu waktu ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh desa seperti persiapan lomba antar desa, upacara adat, kegiatan kepanitiaan acara dan lain lain. Kegiatan pembinaan pelaksana kegiatan ini berbentuk sosialisasi dan pembekalan terhadap masyarakat yang sebelumnya telah ditunjuk oleh pemerintah desa. Tujuan dari diadakanya kegiatan ini adalah untuk membekali peserta dengan materi materi dasar tentang kemampuan menjadi pelaksana kegiatan atau bisa disebut skill kepanitiaan. Sasaran kegiatan ini mayoritas adalah anggota karang taruna desa Gupolo karena pemerintah desa Gupolo memiliki visi ke depan untuk memberdayakan generasi muda desanya.

Kegiatan pembinaan pelaksana kegiatan ini didanai oleh ADD melalui pos pemberdayaan masyarakat. Jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 1.730.000 dalam satu kali masa anggaran. Berikut merupakan rincian penggunaan ADD dalam kegiatan pembinaan pelaksana kegiatan :

**Tabel 17. Rincian Perkiraan Dan Realisasi Penggunaan ADD
Tahun Anggaran 2017 Pembinaan Pelaksana Kegiatan**

No	Uraian	Volume	Satuan Harga	Jumlah dana

1	Cetak dan Pengadaan Baner	1	Rp.250.000	Rp.250.000
2	ATK	1 Paket	Rp.250.000	Rp.250.000
3	Konsumsi	25	Rp.19.200	Rp.480.000
4	Honor pelatih dan narasumber	2	Rp.250.000	Rp.750.000
Total				Rp. 1.730.000
Realisasi Penggunaan				Rp. 1.675.000
Sisa				Rp. 55.000

Sumber : Arsip ADD Desa Gupolo Tahun Anggran 2017 (Diolah Peneliti)

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa perkiraan pengeluaran untuk belanja dalam kegiatan pembinaan pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 1.730.000 dengan perincian untuk cetak dan pengadaan banner sebesar Rp.250.000, pembelian ATK sebesar Rp.250.000, Konsumsi makan dan minum sebesar Rp.480.000 dan honor pelatih serta narasumber sebesar Rp.750.000. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 20 orang dengan 3 narasumber dan 2 panitia pelaksana kegiatan. Realisasi penggunaan anggaran ini adalah sebesar Rp. 1.675.000 sehingga sisa anggaran yang ada adalah sebesar Rp.55.000. hal ini menunjukkan jumlah anggaran yang dialokasikan masih cukup longgar untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan tanpa terganggu dengan sedikitnya jumlah anggaran. Kegiatan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah desa Gupolo karena hasil dari kegiatan pembinaan pelaksanaan kegiatan ini akan dipakai secara langsung oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh bapak Muhajir sebagai sekretaris desa gupolo seperti berikut.

“...kegiatan pembinaan pelaksana kegiatan ini outputnya akan langsung berguna bagi pemerintah desa. Kami secara teknis akan memiliki SDM yang terampil akan urusan pelaksanaan kegiatan. Selain itu perlu digaris bawahi bahwa dengan mengadakan ini pemerintah desa Gupolo sudah berperan dalam memberdayakan generasi muda. Mungkin juga melalui kegiatan ini mereka (pemuda) akan dapat berkembang secara mental.” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Dengan adanya kegiatan pembinaan pelaksana kegiatan ini pemerintah desa Gupolo dapat dikatakan sudah melaksanakan pemberdayaan terhadap sektor potensial dalam hal ini adalah generasi muda. Peningkatan kemampuan peserta yang nantinya akan dibutuhkan oleh pemerintah desa menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan ADD

a. Faktor Pendukung

1) Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung pertama yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan ADD di Desa Gupolo adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembahasan anggaran. Dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi secara langsung dalam pembahasan anggaran maka dapat memudahkan pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan seluruh perangkatnya untuk merumuskan prioritas kebutuhan maupun program yang diinginkan oleh masyarakat Desa Gupolo. Berikut pendapat Bapak Muhajir selaku sekretaris Desa :

“ Setiap ada musrembang menurut saya semakin banyak usul yang diterima oleh pemerintah desa Gupolo. Semakin tahun usul yang ada juga semakin beragam dan menunjukkan inisiatif masyarakat yang mulai sadar akan kebutuhan mereka. Dengan indikator tersebut bisa

saya simpulkan jika partisipasi masyarakat juga semakin baik. Tanpa partisipasi masyarakat kami selaku pemerintah desa tentu bukan apa apa.” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Pernyantaan bapak Muhajir ini ditegaskan oleh salah satu warga desa Gupolo yaitu bapak Irchamni sebagai berikut.

“... setiap musrembang saya datang untuk mewakili RT saya. Sebelumnya saya sudah bermusyawarah di tingkat RT dengan seluruh warga RT tentang usul apa saja yang ingin kami sampaikan pada musrembang. Menurut saya unsur keberhasilan pembahasan anggaran kuncinya ya ditangan masyrakat sebagai subyek pembangunan..” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat ditingkat pembahasan merupakan unsur pokok agar pemerintah dapat menentukan dengan tepat arah pembangunan, pelayanan maupun pemebrdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka kebutuhan program dan kegiatan di Desa Gupolo dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

a) Adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD

Petunjuk teknis pelaksanaan ADD merupakan sebuah panduan tentang bagaimana pemerintah desa mengelola ADD secara baik dan benar. Petunjuk teknis yang dimaksud adalah berupa buku pedoman yang diterbitkan oleh pemeintah Kabupaten. Seluruh tahapan yang ada dalam pengelolaan ADD di desa Gupolo didsarkan pada petunjuk

teknis yang sudah tertulis dala buku pedoman tersebut. Bapak Muhajir selaku sekertaris Desa Gupolo berpendapat bahwa :

“..kami sangat terbantu dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan ADD yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten , semua kegiatan yang didanai oleh ADD sudah digariskan dalam buku pedoman sehingga kami tidak perlu takut akan melakukan penyelewengan. Semua sudah diatur mas, bahkan tunjangan saya juga sudah diatur besarnya dalam petunjuk teknis tersebut.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh pernyataan Bapak Basuki Romdhon selaku Kepala Desa Gupolo bahwa :

“..salah satu unsur pendukung yang sifatnya sangat teknis adalah adanya buku pedoman yang berisi petunjuk teknis penggunaan ADD. Jadi bagaimana kita harus mengelola ADD agar sesuai dengan aturan dan berlandaskan dasar hukum yang kuat sudah ada disitu” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Berdasarkan dengan pendapat dua narasumber diatas, apat ditarik kesimpulan bahwa adanya buku pedoman teknis pengelolaan ADD ini sangat membantu dalam pengelolaan ADD di desa Gupolo. Tersedianya aturan teknis dan dasar hukum yang jelas merupakan sebuah faktor yang sangat penting bagi pemerintah desa dalam menjalankan kebijakannya yang didanai oleh ADD.

b) Kemampuan Sumber Daya Aparatur Desa Gupolo

Tingkat keberhasilan dalam penegelolaan ADD sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa sebagai unsur pokok pengelola ADD. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pengarsipan dan menejamen keuangan ADD, mulai dari tingkat perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian yaitu kantor desa

Gupolo, peneliti melihat bahwa aparatur desa Gupolo cukup cermat dalam melaksanakan pengarsipan terkait dokumen yang diminta peneliti. Dokumen tentang pengelolaan ADD dibuat dalam bentuk softfile dan hardfile yang tersusun rapi baik dalam komputer maupun lemari berkas. Peneliti melihat bahwa peran aktif dari pengelola ADD di Desa Gupolo ini menjadi faktor pendukung dalam pengeleolaan ADD. Bapak Basuki Romdhon selaku kepala Desa menyatakan bahwa :

“... kemampuan dasar dari pernagkat desa untuk mencatat alur pemasukan dan pengeluaran, melaksanakan pelaporan kegiatan dan pertanggung jawaban menjadi salah satu hal yang sangat membantu dalam pengelolaan ADD. Saya kira aparatur desa di Gupolo ini sudah sangat paham dengan tugas pokok fungsinya tersebut..” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Selain pernyataan bapak Basuki Romdhon selaku kepala Desa. Hal lain yang menguatkan asumsi tentang baiknya sumber Daya Aparatur Desa Gupolo adalah pendapat dari Bapak Muhajir yang merupakan Sekertaris dea Gupolo sebagai berikut :

“... dalam pengelolaan ADD tugas saya menyiapkan bahan untuk menyusun rencana penggunaan dan a dan sebagai pelaksana termasuk kegiatan yang didanai oleh ADD. Sudah ada buku pedoman yang mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan ADD yang 70% dan 30% penggunaan untuk apa saja. Berdasarkan hitungan tadi kan kita tinggal membagi presentasenya. Kalau sudah keluar bilangan yang pasti tinggal kita alokasikan ke pos pos yang sudah disepakati.” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Penjelasan dari narasmuber diatas sudah dapat menyimpulkan bahwa dengan aadanya sumber daya aparatur yang mengerti tentang

pengelolaan ADD ini akan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pengelolaan ADD di Desa Gupolo.

c) Pembinaan Inspektorat

Dalam pengelolaan ADD pembinaan dari pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa dilakukan guna meningkatkan tingkat keberhasilan pengelolaan ADD. Pembinaan ini juga bisa dimaknai dengan pengawasan berkala yang dilaksanakan oleh pihak inspektorat kabupaten Ponorogo terhadap pemerintah desa Gupolo untuk memeriksa bagaimana pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD beserta pertanggung jawabannya. Pembinaan ini dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan karena sifatnya yang mengarahkan pengelolaan ADD agar sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis penggunaan ADD. Bapak Muhajir sebagai sekretaris desa Gupolo mengungkapkan bahwa:

“ ... pembinaan dilakukan oleh inspektorat dan BPD, mereka menghimbau agar pemerintah desa mengelola ADD dengan transparan dan akuntabel” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Hal ini didukung oleh bapak basuki Romdhon sebagai Kepala desa yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh inspektorat dan BPD

“..inspektorat biasanya ke kantor tiga bulan sekali, kalau BPD setiap pemerintah desa selesai melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pertanggungjawaban maka mereka yang akan memeriksanya, hal ini menjadi kontrol yang sifatnya positif dalam pengelolaan ADD” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Berdasarkan pendapat kedua narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan baik oleh Inspektorat

maupun BPD akan menjaikan pengelolaan ADD menjadi lebih bertanggung jawab tarnsaparan dan akuntabel.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Relasi

Dalam penggunaan ADD khususnya pada proses belanja barang dan jasa panitia yang ditunjuk oleh pemerintah desa Gupolo untuk melaksanakan tugasnya ternyata sering terhambat karena masalah kurangnya relasi dengan pihak ketiga. Seperti yang disebutkan diawal bahwa sebelum terjadi proses belanja barang dan jasa terlebih dahulu, pemerintah desa melalui panitia khusus akan melakukan survey mengenai harga dan spesifikasi barang maupun jasa tersebut . Krangnya relasi dengan pihak ketiga seperti penyedia baranag maupun jasa tentu akan menyulitkan proses survey. Saat dilapangan, peneliti menemukan fakta bahwa keterbatasan relasi ini terjadi hampir di setiap prosess survey pengadaan barang dan jasa , hal ini dikemukakan oleh bapak Muhajir selaku sekertaris desa sebagai berikut.

“ ini yang menjadi salah satu hambatan kami sebagai pemerintah desa dalam membelanjakan anggaran yaitu kurangnya relasi dengan pihak ketiga sebagai mitra untuk berkerjasama, padahal kami dalam belanja anggaran harus menjalin koneksi dengan penyedia barang dan jasa yang akan kami gunakan. Semisal kita mau membeli pasir atau semen untuk bangun tanggul harusnya kita sudah tahu fluktusai harganya berapa harganya pada tanggal segini berapa harganya tiga bulan kedepan dan lain lain. Idealnya kita harus punya mitra guna menjalin kerjasama strategis. (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo

Melihat dari pernyataan bapak muhajir selaku sekretaris desa tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurangnya relasi dengan pihak ketiga dapat menghambat efektivitas pengelolaan ADD. Dengan tidak adanya mitra strategis dalam proses pengadaan barang dan jasa maka pihak pemerintah desa sering mengalami kegagalan dalam menentukan spesifikasi maupun harga ketika melakukan belanja barang dan jasa.

2) Waktu Pencairan

Pada proses pencairan ADD mekansimenya dibagi menjadi dua kali tahapan, dalam satu tahun semester pertama pada enam bulan pertama dan semester kedua pada enam bulan kedua. Jika terjadi keterlambatan dalam proses pencairan ADD maka akan dapat menghambat kelancaran kegiatan yang didanai melalui ADD hal ini disampaikan oleh Bapak Muhajir selaku sekretaris Desa Gupolo sebagai berikut :

“... waktu pencairan sering meleset dari perkiraan mas. Kadang pencairannya itu molor dan waktunya jadi mepet dengan waktu LPJAn. Kegiatan jadi nggak lancar kalau dananya telat mas.”
(wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Pernyataan Bapak Muhajir didukung oleh pernyataan Bapak Basuki Romdhon selaku kepala Desa Gupolo yang menyatakan sebagai berikut :

“... hambatan utama ya waktu pencairan dana. Pernah saya mencatat keterlambatan ini sampai satu bulan sampai tiga bulan dari waktu yang seharusnya” (wawancara dilakukan pada Tanggal 5 Februari pukul 9 pagi berlokasi di Kantor Desa Gupolo)

Dari pernyataan bapak Muhajir dan bapak Basuki Romdhon dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu pencairan ADD yang kurang tepat dapat berpengaruh terhadap terlaksananya kegiatan yang didanai oleh ADD. Dengan terhambatnya kegiatan maka terhambat pula efektivitas pengelolaan ADD.

C. Analisis Data Fokus

1. Efektivitas Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan

a. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1) Perencanaan

Tahap pertama dari pengelolaan ADD adalah proses perencanaan anggaran. Di dalam proses perencanaan anggaran, pemerintah desa sebagai pihak yang mempunyai kuasa dalam penggunaan ADD akan mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa untuk melaksanakan rapat. Kegiatan rapat ini akan membahas tentang rencana penggunaan anggaran desa, termasuk didalamnya adalah ADD. Kegiatan perencanaan ini nantinya akan dituangkan dalam kegiatan rutin desa bernama musrembang. Melalui kegiatan musrembang akan diketahui mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat desa dan dapat dipenuhi oleh pemerintah desa. Melalui sebuah perencanaan maka kegiatan ataupun program yang didanai oleh ADD dapat berjalan lebih terarah.

Perencanaan yang ada di dalam kegiatan musrembang desa Gupolo ini memberdayakan hampir seluruh elemen masyarakat yang ada desa Gupolo. Pihak yang hadir mulai dari tingkat RT sampai lembaga lembaga desa seperti PKK dan Karang Taruna. Sebelum kegiatan dimulai, pemerintah desa gupolo akan memberikan surat berbentuk blangko kepada masing masing RT. Kemudian masing masing RT akan mengadakan pertemuan dengan warganya untuk membahas dan merumuskan apa saja kebutuhan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah desa dalam bentuk data. Data dari seluruh RT di desa Gupolo inilah yang nantinya akan menjadi bahan dalam pembahasan musrembang. Karena hasil dari rapat di tingkat RT ini bisa sangat beragam maka tidak semua usul yang diterima oleh pemerintah desa dapat direalisasikan. Dilihat dari kondisi lapangan dan waktu pelaksanaan maka pemerintah desa akan menjalankan usulan dengan tingkat prioritas yang tinggi terlebih dahulu. Berdasarkan pendapat bapak Muhajir selaku sekertaris Desa maka pemerintah desa gupolo akan menyusun skala prioritas untuk dijadikan bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan program tahun anggaran selanjutnya. Pemerintah desa gupolo mempunyai kuasa untuk mengarahkan kebutuhan program menuju pos pos yang tersedia sehingga usulan dari warga akan disesuaikan dengan skala prioritas.

Penentuan skala prioritas di desa gupolo didasarkan pada apa yang tertulis dalam buku pedoman pelaksanaan ADD. Skala prioritas sengaja disusun mengingat sumber daya yang ada untuk merealisasikan seluruh

usulan masyarakat jumlahnya terbatas. Dalam Peraturan Bupati Ponorogo No 17 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan ADD tahun anggaran 2017 telah tercantum tentang bagaimana tata cara penggunaan yang berisikan aturan dan panduan dalam belanja pegawai dan operasional maupun belanja pemberdayaan masyarakat. dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan hukum yang jelas dalam penyusunan program dan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri No. 6 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yang menyatakan bahwa kegiatan penyusunan anggaran memerlukan suatu input maka kegiatan musrembang yang sudah dilaksanakan di desa Gupolo sudah tepat dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh peraturan. Input atau masukan yang dimaksud adalah adanya usulan maupun masukan tentang program kebutuhan baik di bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat selama satu tahun anggaran ke depan. Seluruh input yang telah terkumpul tersebut akan diproses. Proses tersebut secara teknis akan dilakukan melalui pengelompokan masalah dan menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat. output dari proses ini berupa peringkat usulan kebutuhan masyarakat atau skala prioritas kebutuhan rekapitulasi rencana program serta pembagian penggunaan keuangan desa dalam membiayai program program tersebut. Kegiatan musrembang di Desa Gupolo juga telah melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat desa Gupolo. Terlihat mulai

dari tahap perumusan program maupun kebutuhan di tingkat RT hingga usulan tersebut disampaikan pada kegiatan musrembang.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, kegiatan lanjutan setelah perumusan kebutuhan adalah sosialisasi hasil dari perencanaan tersebut kepada seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat hanya perwakilan dari setiap elemen masyarakat saja yang menghadiri kegiatan perencanaan anggaran. Sosialisasi dilaksanakan dengan membuat baner yang berisikan tentang jumlah ADD tahun anggaran 2017 yang diperoleh oleh desa Gupolo serta penggunaannya. Pemasangan baner sengaja dilakukan di titik strategis seperti balai desa dan jalan utama di desa Gupolo agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai ADD dengan lebih mudah. Sejatinya pengadaan banner merupakan salah satu penyampaian informasi lewat media cetak yang bertujuan untuk menjadikan pengelolaan ADD lebih transparan. Selain penggunaan baner sebagai media sosialisasi pemerintah desa Gupolo juga memberikan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada masing-masing RT di wilayah desa Gupolo yang isinya juga merupakan jumlah ADD dan peruntukannya. Selanjutnya setiap ketua RT akan memberitahukan isi surat ini kepada warganya dalam kegiatan rapat rutin RT. Cara ini ternyata cukup efektif untuk menyampaikan tentang adanya dana ADD serta penggunaannya dapat diketahui secara merata oleh masyarakat desa Gupolo.

Kegiatan perencanaan yang dituangkan lewat musrembang ini sudah dilakukan dengan baik oleh desa Gupolo. Melihat bahwa unsur dalam perencanaan yaitu adanya partisipasi masyarakat dan pengelompokan tugas sudah terpenuhi maka hal ini sesuai dengan teori George R Terry dimana dalam tahapan perencanaan ini sudah terdapat proses organizing atau bisa diterjemahkan sebagai pengorganisasian. Menurut Terry dalam Siagian (1990) : 116) pengorganisasian merupakan sebuah usaha pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian pada saat musembangdes tentang tata kelola ADD dilakukan oleh kepala desa yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD) dan bendahara desa.

Selain itu kegiatan perencanaan atau musrembang ini juga sesuai dengan teori POSDCORB yang dikemukakan oleh Luther Gulick dimana definisi perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yang harus dikerjakan, dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Didalam musrembang juga hanya membahas hal hal yang sifatnya umum atau garis besar perencanaanya saja, sementara untuk hal yang sifatnya rinci dan teknis akan dibicarakan pada tahap selanjutnya

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi perencanaan ADD di desa Gupolo sudah sesuai dengan konsep *planing* dalam teori POAC yang dicetuskan oleh George R. Terry. Dan konsep Planing dari Luther Gulick dalam POSDCORB

2) Penganggaran

Pengertian proses penganggaran adalah sebuah kegiatan dimana rencana maupun program yang telah ditetapkan dalam musrembang akan dinyatakan dalam skala keuangan. Kegiatan penganggaran ini dilakukan berdasarkan kesesuaian antara jumlah dana yang dianggarkan dengan jumlah dana yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan penggunaan ADD. Tata cara penganggaran di desa Gupolo didasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo No 17 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan ADD tahun anggaran 2017 yang mengatur seluruh alokasi penggunaan dana ADD. Misalnya mengenai jumlah dana yang harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, tunjangan perangkat desa sampai pembangunan. Adanya peraturan tersebut cukup membuat pengelolaan ADD menjadi efektif sesuai yang digariskan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Permasalahan yang kemudian muncul dalam proses penganggaran di desa Gupolo adalah kurangnya jumlah ADD yang dianggarkan untuk beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat semisal kegiatan sosialisasi keluarga berencana. Kenyataan di lapangan yang dilihat peneliti melalui observasi dokumen RKP adalah ADD terlalu banyak terserap untuk membiayai tunjangan perangkat desa. Padahal sudah jelas tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo No 17 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan ADD tahun anggaran 2017 yang menyebutkan bahwa prioritas utama penggunaan ADD adalah untuk membiayai kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara teori penganggaran yang diterapkan di desa gupolo ini menganut pada konsep penganggaran berbasis kinerja dimana menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website resminya www.anggaran.depkeu.go.id, anggaran berbasis kinerja merupakan suatu mekanisme penganggaran yang sumber sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. Pertama pemerintah desa selaku pemegang kuasa anggaran akan menyusun rencana strategis yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, kemudian pemerintah desa akan menetapkan standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal. Adanya standar harga akan memudahkan penentuan spesifikasi dalam proses belanja barang dan jasa, adanya tolok ukur akan memudahkan penentuan tentang berhasil atau tidaknya program dan kegiatan yang sudah diadani anggaran dan adanya standar pelayanan minimal akan menjadikan kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat dapat terjaga.

Proses penyusunan anggaran ADD di desa gupolo ini sudah sesuai konsep penganggaran yang dikemukakan oleh Luther Gulick dimana Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Sesuatu anggaran, baik APBN maupun APBD maupun APBDes, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja dalam

opersionalnya maka Dalam penyusunan rincian rencana penggunaan ADD pun telah ditetapkan beberapa aspek yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh kementerian keuangan Republik Indonesia. Namun disisi lain terdapat permasalahan dimana pemanfaatan program ADD masih kurang maksimal akibat pembagian anggaran yang kurang merata antar pos.

3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan sebuah rangkaian proses yang didalamnya terdapat dua unsur utama yaitu kegiatan penyaluran dan pencairan ADD. Mengacu pada Peraturan Bupati Ponorogo No 17 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan ADD, persyaratan dalam pencairan dana ADD meliputi surat pengantar dari camat, surat permohonan kepala desa, kwitansi bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Laporan penggunaan ADD tahun sebelumnya, rekapitulasi rencana penggunaan dana (RPD) tahap I dan II ADD tahun 2017 rincian RPD ADD masing masing kegiatan, surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala desa bermeterai 6000, peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017, foto copy buku rekening, foto copy NPWP bendahara desa dan keputusan kepala desa tentang pengangkatan bendahara desa tahun 2017. Seluruh lampiran persyaratan tersebut akan dilaporkan ke pihak kecamatan untuk diteliti. Dana akan dapat cair setelah berkas dinyatakan lengkap dan dipertanggung jawabkan. Pencairan dana ADD dilakukan pada bank yang telah ditunjuk oleh camat.

Proses pencairan dana ADD yang terjadi di desa gupolo selama ini terjadi dengan lancar dan tertib karena persyaratan yang sudah ditetapkan dalam proses pencairan dana ADD selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah desa Gupolo. Namun sebagai catatan waktu pencairan dana ADD dari Bank sering mengalami keterlambatan akibat alasan yang tidak diketahui. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di desa Gupolo.

Proses selanjutnya dalam penatausahaan adalah proses penyaluran dana ADD menuju pos pos yang telah ditetapkan dalam rencana penggunaan dana yang telah dibuat. Sebagai konsekuensi logis dari adanya transparansi dalam penyaluran dana ADD maka pemerintah desa Gupolo mengumpulkan seluruh elemen masyarakat di desa Gupolo untuk diberikan pengarahan bahwa dana ADD yang telah cair tersebut akan disalurkan sesuai kesepakatan awal yang terjadi antara pemerintah desa dan elemen masyarakat. hal ini dilakukan semata mata karena Peraturan Bupati Ponorogo No 17 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan ADD mengatur dengan jelas pelaksanaan kegiatan ini.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penatausahaan yang meliputi pencairan dan penyaluran dana ADD sudah sesuai dengan prosedur yang mengacu pada Peraturan Bupati Ponorogo No 17 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan ADD.

4) Pelaporan

Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD wajib dilaporkan secara administratif yang artinya seluruh catatan mengenai bukti pembayaran maupun penegeluaran serta dokumentasi harus dikumpulkan dan dijadikan satu dalam sebuah laporan. Laporan ini berisi tentang rincian pelaksanaan kegiatan beserta biaya yang bersangkutan dengan kegiatan.

Fungsi dari adanya pelaporan adalah sebagai bentuk pengendalian untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Bukti bukti yang biasanya dicantumkan dalam suatu laporan adalah nota, kwitansi maupun bukti sah lainnya yang berkaitan dengan pembayaran barang dan jasa. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka penggunaan ADD hanya dapat digunakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam rencana penggunaan dana ADD.

Pelaksanaan laporan di desa Gupolo dibagi menjadi dua bentuk dengan waktu pengajuan laporan yang berbeda pula. Pertama, laporan berkala yang sifatnya rutin dilaksanakan setelah pemerintah desa Gupolo selesai melaksanakan suatu kegiatan yang didanai oleh ADD. Laporan yang kedua adalah laporan akhir yang berisi tentang pelaporan seluruh kegiatan selama satu tahun masa anggaran, di dalam laporan akhir terdapat pula rincian tentang permasalahan yang dihadapi dan saran tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan peneliti tentang dokumen pelaporan kegiatan desa gupolo bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan laporan sudah berjalan dengan tertib

dan rapi. Hal ini bisa dilihat dari lengkapnya bukti lampiran tentang kegiatan berupa nota, kwitansi ataupun rincian pembayaran.

Dengan adanya pelaporan ini maka konsep POSDCORB yang dikemukakan oleh Luther Gulick juga sudah diterapkan di Desa Gupolo dimana pelaporan yang ada ditunjukkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer dalam hal ini BPD Pemerintah Desa dan Masyarakat, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer

Adanya pelaporan ini memang merupakan wujud dari transparansi dan pertanggungjawaban desa terhadap pemakaian ADD yang telah diterimanya kepada masyarakat. hal ini sesuai dengan Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan yang harus sinkron dengan rencana penggunaan dana juga bisa menempatkan fungsi laporan sebagai instrumen pengendalian pengeluaran agar tidak membengkak melebihi dari apa yang direncanakan. Selain itu adanya laporan ini juga sesuai dengan teori administrasi keuangan menurut Abdullah (1983;13) yang menyebutkan behwasnya administrasi keuangan mencakup pertanggungjawabn, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan dana serta pengadaan.

5) Pertanggungjawaban

Tahapan yang harus dilaksanakan sesudah adanya pelaporan adalah pertanggungjawaban. pertanggungjawaban merupakan proses penyampaian laporan yang sudah disusun oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah kecamatan. Kegiatan pertanggungjawaban ini akan menyampaikan laporan tentang pengelolaan kegiatan yang didanai oleh ADD dan apa saja yang menjadi permasalahannya. Di tingkat kecamatan seluruh laporan yang masuk dari setiap desa di wilayah administratifnya akan direkap untuk kemudian di sampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten.

Pelaksanaan pertanggungjawaban di tingkat desa dilakukan dalam dua kali periode mengikuti pencairan dana ADD dari Kabupaten. Setelah dana ADD turun baik tahap pertama maupun kedua maka pemerintah desa akan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat untuk membahas tentang penggunaan anggaran untuk periode selanjutnya sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana ADD dari periode sebelumnya. Pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana ADD dapat dikatakan sah jika sudah mendapatkan persetujuan dari BPD sebagai lembaga pengawas internal. Hal ini akan dibuktikan dengan penandatanganan nota persetujuan oleh ketua BPD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditemukan fakta menarik mengenai laporan pertanggungjawaban di desa Gupolo, dimana pengumpulan perwakilan

masyarakat dan lembaga lembaga tinggi desa untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban merupakan hal yang kurang efektif karena rendahnya antusiasme masyarakat untuk menyimak hal hal yang berkaitan dengan transparansi keuangan. Padahal menurut peneliti laporan pertanggungjawaban ini dapat disosialisasikan ke masyarakat lewat media sosial sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai akuntabilitas dana ADD ini sewaktu waktu. Ife dan Zubaedi (2007:43) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk memberdayakan diri mereka sendiri lewat peningkatan aksesibilitas terhadap lembaga pemerimtahan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan laporan pertanggungjawaban di desa Gupolo belum dilakukan dengan optimal. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pengelolaan ADD bagi masyarakat.

6) Pengawasan

Pengelolaan ADD tidak selamanya sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan maka dari itu pemerintah desa butuh pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal. Jika diuraikn maka pengawasan dana ADD akan meliputi seluruh tahap pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.

Pengawasan dana ADD di desa gupolo dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai pihak eksternal. Inspektorat melaksanakan proses pengawasan secara berkala untuk memeriksa peertanggungjawaban ADD pada tahun anggaran 2017. Sebagai pihak internal yang melakukan

pengawasan maka BPD menjadi lembaga desa yang mendapat wewenang untuk menjalankan fungsi control terhadap penggunaan anggaran. Hal ini sesuai dengan apa yang tercatum pada Undang undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

Berdasarkan konsep *controlling* dalam terori POAC menurut Terry dalam Siagian (1990 : 135) pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Jika merunut pada konsep ini maka desa Gupolo sudah melaksanakan dua jenis pengawasan tersebut dimana pengawasan langsung sudah dilaksanakan oleh BPD sebagai pihak internal yang melaksanakan pengawasan atas dasar pemeriksaan kegiatan. Dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Ponorogo atas dasar laporan tertulis yang sudah disusun pemerintah desa.

b. Penggunaan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang diadakan untuk mengimbangi otonomi daerah yang telah bergulir pasca reformasi tahun 1998. Dasar hukum dari alokasi dana desa ini dituangkan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selain itu alokasi dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Penggunaan alokasi dana desa umumnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua kegiatan yang sumbernya berasal dari alokasi dana desa dikelola

secara terbuka oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

Pengelolaan program Alokasi Dana Desa di desa Gupolo menjadi fokus utama dalam penelitian ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam pemberdayaan masyarakat desa walaupun tidak lepas dari berbagai hambatan yang menyertainya di lapangan. Pemerintah desa Gupolo secara terstruktur telah menunjukkan pertanggungjawabannya dalam proses pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat. hal ini tidak lepas dari bukti kongkrit yang telah diberikan pemerintah desa Gupolo terkait dengan penggunaan alokasi dana desa. Harapan dari masyarakat untuk pemerintah desa Gupolo adalah pengalokasian anggaran alokasi dana desa disalurkan secara merata dan tepat sasaran sesuai dengan target yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Dari keseluruhan alokasi dana desa yang diterima desa Gupolo pada tahun 2017 sebesar Rp. 361.355.000 tersebut diharapkan mampu untuk menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Gupolo seperti pemberdayaan di bidang kesehatan, kapasitas masyarakat, dan sosial. Selain anggaran yang mencukupi partisipasi masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pengelolaan alokasi dana desa utamanya pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Penelitian bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Kurniawan (2005:19) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program

ataupun misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Berdasarkan dari konsep tersebut, maka dalam menilai efektivitas ADD ini akan melihat dari bagaimana pencapaian dan penggunaan ADD khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Efektivitas peneglolaan ADD dalam pemberdayaan juga dapat dilihat dari bagaimana keseuaian rencana dan pencapaian rencana tersebut.

1) Pembinaan PKK

Pengalokasian Anggaran alokasi dana desa untuk melaksanakan kegiatan pembinaan PKK mencapai Rp. 17,067,500 yang sebgain besar atau senilai Rp. 12.125.000 digunakan untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK. Dengan alokasi yang cukup besar ini pemerintah desa Gupolo berharap dapat mengoptimalkam peran wanita untuk untuk memberdayakan masyarakat dari sektor kesejatheraan keluarga . Wanita dengan PKK sebagai wadah organisasinya dipandang mampu memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan di desa Gupolo.

Usaha untuk meningkatkan pembangunan desa melalui peran serta wanita dengan organisasi PKK nya dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi masyarakat desa yang umumnya terdiri dari kesatuan rumah tangga beranggotakan ayah ibu dan anak. Pengkodisian kaum wanita untuk dapat terberdayakan melalui program pokok PKK demi terciptanya iklim pembangunan yang positif ini sangat sesuai dengan pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (1997:218)

yang menyebutkan bahwa pendekatan suasana dan iklim merupakan salah satu kunci agar potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal.

Kegiatan pembinaan PKK yang didanai ADD di desa Gupolo pada tahun 2017 masih didominasi oleh acara sosialisasi dan pelatihan kepada anggota PKK dengan materi yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengurus PKK sementara kegiatan untuk mendukung swadaya masyarakat demi mengembangkan potensinya bisa dikatakan cukup terbatas. Anggaran untuk kegiatan ini sendiri juga masih didominasi oleh bantuan dari pemerintah tanpa memiliki sumber lain di luar ADD. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan PKK di Desa Gupolo ini masuk dalam katagori kegiatan suport pemberdayaan belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan yang dana maupun kegiatannya bersumber dari masyarakat dan digunakan untuk masyarakat itu sendiri.

2) Pembinaan Dan Pemberdayaan Keluarga Berencana

Pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana merupakan upaya pemerintah desa Gupolo untuk mewujudkan masyarakat dengan jumlah keluarga yang kecil dan kualitas kesehatan yang tinggi. Kegiatan ini diwujudkan dengan penyuluhan tentang pentingnya program KB oleh tenaga kesehatan setingkat perawat dan bidan di desa Gupolo secara teratur sekali dalam sebulan. Kegiatan ini difokuskan terhadap pasangan muda yang baru menikah di desa Gupolo sehingga efektivitasnya akan lebih tinggi dibanding jika menasar kepada pasangan yang sudah lama

menikah. Untuk dapat merealisasikan program ini pemerintah desa Gupolo mengalokasikan anggran ADD sebesar Rp. 1.500.000 dengan keseluruhan anggaran digunakan untuk memberikan honorarium kepada Petugas Penyuluh Keluarga Brencana Desa atau disingkat PPKBD dan pembantunya masing masing sebesar Rp. 400.000 dan Rp. 1.100.000. untuk pembantu PPKBD ini yang anggotanya berjumlah 4 orang masing masing mendapat Honorarium sebesar Rp.275.000.

Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Berencana Ini relatif mendapatkan porsi anggaran yang kecil sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasanya keterbatasan alokasi anggran ini menjadikan kegiatan ini kurang efektif. Keterbatasan anggaran juga yang membuat kegiatan ini hanya berkuat pada masalah sosialisasi sehingga aksi nyata di lapangan berupa penyediaan alat kontrasepsi dan obat obatan untuk ibu hamil tidak dapat dilakukan. Untuk menyiasati hambatan tersebut petugas penyuluh di lapangan berkerjasama dengan pihak ketiga seperti apotik rujukan dan puskesmas pembantu.

3) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa

Alokasi anggaran ADD yang digunakan untuk melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan kapasitas masyarakat Desa sebesar Rp. 6.145.000 yang dibagi kedalam lima sub kegiatan antara lain :

- a) Pembekalan peningkatan kapasitas kepala Desa
- b) Kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum

- c) Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak
- d) Kegiatan Sosialisasi Poskesdes
- e) Kegiatan Pelatihan Kader JUMANTIK

Usaha untuk meningkatkan taraf pembangunan desa melalui peningkatan kapasitas masyarakatnya dilakukan dengan berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi berkejasama dengan pihak terkait, contohnya kegiatan sosialisasi keluarga sadar hukum yang berkerjasama dengan kepolisian untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan pengertiannya. Pemerintah desa Gupolo disini berperan untuk mewadahi masyarakat guna menumbuhkan kapasitasnya dalam berbagai bidang dengan cara menyediakan ruang dan kesempatan untuk memperoleh ilmu dari pihak pihak yang berkompeten. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu menunjang kelancaran pembangunan desa melalui kapasitas yang dimiliki oleh masyarakatnya.

4) Pembinaan Pelaksana Kegiatan

Dalam kegiatan pembinaan pelaksana kegiatan ini pemerintah desa Gupolo berupaya menyediakan sumber daya manusia yang ahli untuk sewaktu waktu dipakai oleh desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan seperti persiapan lomba maupun kegiatan desa lainnya. Kegiatan ini berfokus kepada para pemuda desa Gupolo untuk mengikuti pelatihan menejerial acara. Alokasi Dana Desa yang dipakai untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.730.000.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini merupakan gabungan antara pemanfaatan sumber daya manusia di desa Gupolo dan Kebutuhan Desa akan tenaga ahli dalam penyelenggara kegiatan atau kepanitiaan. Melihat dari tujuan penyelenggaraan kegiatan itu, peneliti menilai bahwa pemerintah desa Gupolo sudah melakukan tindakan yang cukup strategis dalam penggunaan anggaran yang berasal dari ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Satu sisi masyarakat dapat terberdayakan dan pemerintah desa Gupolo mendapat manfaat langsung dari terberdayakannya masyarakat desa. Dari pernyataan diatas maka peneliti menemui kesimpulan bahwa penggunaan ADD untuk kegiatan pembinaan pelaksana kegiatan merupakan tindakan yang tepat dari pemerintah desa Gupolo berdasarkan indikator keberdayaan masyarakat yaitu Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial, fasilitator juga berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai partisipan yang berperan mensukseskan kebijakan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas ADD Dalam

Pemberdayaan Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Efektivitas pengelolaan ADD ini dilihat dari bagaimana pemerintah desa Gupolo menyelenggarakan tata kelola keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari anggaran ADD tersebut. Terciptanya efektivitas

dari pengelolaan ADD ini tentu tidak lepas dari faktor faktor pendukung. Berikut ini peneliti akan menjelaskan beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung efektivitas pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di desa Gupolo.

1) Partisipasi Masyarakat

Faktor pertama yang menjadi faktor pendukung dalam efektivitas pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gupolo adalah tingginya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan penggunaan dana ADD. Mulai dari tingkat RT yang mengadakan musyawarah bersama untuk membicarakan kegiatan maupun program pembangunan yang nantinya akan dibawa untuk menjadi aspirasi pada acara musrembangdes. Selain musyawarah yang dilakukan pada Tingkat RT lembaga lembaga yang ada di Desa Gupolo juga turut aktif dalam merumuskan rencana penggunaan anggaran di Desa Gupolo.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka program-program khususnya pemberdayaan masyarakat dapat dihimpun untuk sama sama dipecahkan melalui kehadiran pemerintah desa yang didanai ADD. Pemecahan solusi bersama sama tentang masalah pemberdayaan merupakan kunci utama pembangunan desa yang berorientasi pada aspirasi masyarakat. dengan meningkatnya aspirasi masyarakat, akan terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk memajukan desanya sangat tinggi pula.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti di Desa Gupolo bahwasanya partisipasi masyarakat di desa Gupolo sangatlah tinggi sehingga dapat dimasukan sebagai faktor pendukung dalam efektivitas pengelolaan ADD. Partisipasi masyarakat baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dukungan terhadap program program yang akan dibentuk selama masa satu periode anggaran ke depan. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini yang akhirnya berbuah usulan berupa konsep pemberdayaan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Gupolo maka setia usulan dari masyarakat merupakan masukan berharga terhadap pemerintah Desa Gupolo untuk melaksanakan tugasnya kedepan.

2) Adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD

Sebagai sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten maka terdapat pula buku petunjuk teknis tentang pelaksanaan ADD yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten sebagai upaya untuk membantu pengelola ADD dalam mengelola dan menggunakan ADD dengan terarah sehingga tujuan dari adanya ADD dapat tercapai dengan optimal. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan ADD ini terdapat beberapa regulasi terkait ADD dan panduan dalam mengolah serta menggunakannya. Mengacu pada buku petunjuk teknis pelaksanaan ADD penggunaan ADD dibagi menjadi 2 pos utama yaitu pemberdayaan masyarakat serta belanja pegawai dan operasional pemerintah desa. Program program yang terkait

pos penggunaanya telah diarahkan dalam buku ini sehingga pengolaj ADD hanya perlu menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan dari masyarakat.

Dengan adanya buku petunjuk teknis pelaksanaan ADD ini, maka pengelola ADD di desa Gupolo sangat terbantu. Buku petunjuk ini menjadikan pengelolaan ADD menjadi terarah sesuai dengan yang digariskan oleh perundang undangan. Pemerintah desa Gupolo dalam melaksanakan penganggaran serta melaksanakan pos pos penggunaan ADD sangat mengacu pada buku tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa buku ini merupakan faktor pendukung yang memainkan peran secara langsung terhadap efektivitas pengelolaan ADD.

3) Kemampuan Sumber Daya Aparatur Desa Gupolo

Kemampuan sumber daya aparatur pemerintah desa gupolo yang tergolong cukup baik menjadi salah satu faktor pendukung yang turut menyukseskan pengelolaan ADD. Pengelolaan ADD sendiri tidak mungkin dapat berjalan secara efektif jika petugas yang bertanggungjawab untuk mengelola anggaran kurang teliti maupun cermat dalam proses pengarsipan. Disini peneliti melihat ketelitian dan kecermatan aparatur desa Gupolo sebagai petugas pengelolaa ADD menunjukkan tren yang positif. Ditunjang dengan penguasaan teknologi digital yang cukup baik dan sitematika pengarsipan yang rapi maka seluruh proses pengelolaan ADD di desa Gupolo dapat berjalan dengan lancar tanpa terkendala oleh masalah teknis.

Pemahaman masing masing aparaturnya mengenai konsep ADD dan regulasinya juga merupakan fakta menarik yang dapat menunjang efektivitas pengelolaan ADD bagi pemberdayaan masyarakat di Desa Gupolo. Jika ditinjau secara mendalam, aparaturnya pemerintahan di Desa Gupolo ternyata sudah sangat paham mengenai tata kelola ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang optimal. Kemampuan SDM dalam mengelola ADD ini berhubungan erat dengan bagaimana tata cara menyusun skala prioritas, sehingga dengan kemampuan tersebut pemerintah desa Gupolo dapat memilih kebutuhan yang harus direalisasikan dan dianggarkan sesuai kebutuhan serta sumber daya yang tersedia.

Tidak semua kebutuhan dapat direalisasikan pada tahun 2017 sehingga aparaturnya pemerintahan desa Gupolo menenpatkan hal itu menjadi pertimbangan pada tahun anggaran selanjutnya. Terbatasnya sumber daya yang tersedia baik SDM maupun pendanaan menuntut pengelola ADD untuk menerapkan prinsip hemat, terkendali dan terarah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti berkesimpulan bahwa aparaturnya pemerintahan desa Gupolo mempunyai kapasitas yang baik dalam pengelolaan ADD.

4) Pembinaan Inspektorat

Pembinaan yang dilakukan inspektorat terhadap pengelolaan ADD merupakan upaya pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pembinaan dari inspektorat berfokus terhadap teknis teknis pengelolaan anggaran sekaligus mengawasi bagaimana pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD beserta pertanggungjawabannya. Tujuan dari adanya pembinaan yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai pengawasan rutin ini adalah mengantisipasi potensi kesalahan dalam pengelolaan ADD dan mengendalikannya melalui struktur dan sistem sehingga penggunaan ADD dapat dimanfaatkan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan. Beberapa potensi kesalahan pengelolaan dalam pengelolaan ADD perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian demi meminimalisir potensi tersebut. Hal hal yang telah disebutkan diatas menjadikan pembinaan inspektorat terhadap pengelolaan ADD di Desa Gupolo menjadi faktor pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan ADD bagi pemberdayaan masyarakat.

Pembinaan oleh inspektorat ini sangat sesuai dengan konsep *controlling* dalam teori POAC yang menyatakan bahwa kinerja harus sesuai dengan rencana. Hal ini berarti akan membandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, pengawas harus mengambil tindakan yang sifatnya mengoreksi. Menurut penelitian di desa Gupolo pembinaan ini sudah dilaksanakan secara rutin dan komprehensif

sehingga dapat disimpulkan pengelolaan ADD mendapat dukungan maksimal dari berbagai lembaga termasuk inspektorat.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Relasi

Keterbatasan relasi merupakan permasalahan yang cukup menghambat dalam pengelolaan ADD di desa Gupolo. Hal ini terjadi ketika dalam proses pengadaan barang dan jasa dimana panitia pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah desa ternyata kurang memiliki koneksi dengan pihak ketiga yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa. Hambatan ini akan menyulitkan tidak hanya pada saat proses pengadaan barang dan jasa bagi pemberdayaan masyarakat saja, namun lebih dari itu, kurangnya relasi dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa akan sangat mempengaruhi proses penyusunan anggaran dimana pemerintah desa Gupolo akan kesulitan menyusun perkiraan harga barang atau jasa sebelum memutuskan untuk membelanjakan anggaran ADD. Seperti yang telah diungkapkan oleh peneliti sebelumnya bahwasanya pemerintah desa Gupolo selalu mengadakan survey mengenai harga barang dan jasa terbaru di pasaran sebagai data pendukung dalam proses penyusunan anggaran maka keterbatasan relasi dengan pihak ketiga akan membuat proses pengelolaan ADD menjadi tidak optimal.

Hubungan dengan pihak ketiga prinsipnya adalah kesepakatan pelaku ekonomi yang efisien dan optimal yang mengikat dua pihak di dalam suatu kesepakatan bersama dimana hak dan kewajiban masing-

masing adalah jelas. Jika membicarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah desa, maka kesepakatan yang dibuat adalah antara Pemerintah desa diwakili oleh Panitia dengan Pihak ketiga sebagai penyedia. Masing-masing pihak hendaknya memiliki koneksi yang baik atau setidaknya kontrak sebagai mitra. Tetapi pada kenyataannya di desa Gupolo, pihak pemerintah desa selama ini ternyata belum memiliki mitra dalam pengadaan barang dan jasa semisal mitra berupa penyedia barang seperti toko material atau mitra dalam penyedia jasa seperti agensi. Menurut Manurung (2013:34), ketika dua atau lebih individu akan mengikat kerja sama dalam suatu perjanjian dan salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain tentang perjanjian ini dan dimana karena pengetahuan ini dapat menyebabkan kerugian atau pun keuntungan pada salah satu pihak telah terjadi informasi asimetri dalam bentuk hidden action.

2) Waktu Pencairan

Waktu pencairan ADD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengelolaan ADD di tingkat pemerintah desa. Semakin cepat anggaran ADD cair maka akan semakin cepat pula proses pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan semakin cepatnya proses pengelolaan ADD maka dampak yang dirasakan masyarakat melalui program pemberdayaan yang didanai oleh ADD akan semakin cepat pula terealisasi. Dalam pelaksanaan pembangunan waktu dan biaya memiliki saling keterkaitan dan merupakan faktor penting

yang menentukan pembangunan tersebut berjalan maju atau tidaknya. Jika dana tersedia maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar tetapi sebaliknya jika tidak pembangunan akan terhambat.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di desa Gupolo faktor waktu pencairan ADD ini justru menjadi penghambat dalam mencapai efektivitas pengelolaan ADD. Keterlambatan pencairan yang sering mencapai satu bulan atau bahkan lebih berdampak sistemik terhadap keseluruhan proses pengelola anggaran. Hal yang paling dapat dirasakan adalah ketika akan terjadi pelaksanaan kegiatan dan dana yang dibutuhkan belum juga cair, maka secara langsung atau tidak langsung kegiatan menjadi terlambat dari jadwal.

Menurut peneliti hambatan ini merupakan hambatan yang tidak bisa dihindari karena pencairan anggaran ADD sangat bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten. Adanya hambatan karena faktor eksternal ini bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa melainkan murni terjadi akibat kurang tertibnya penyaluran dana perimbangan ADD dari Kabupaten.

Berdasarkan fakta fakta yang telah ditemui di lapangan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan ADD di Desa Gupolo keterlambatan pencairan dana ini menjadi faktor penghambat tercapainya efektivitas pengelolaan ADD khususnya untuk pemberdayaan masyarakat yang mengharuskan dana cair sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang efektivitas pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gupolo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan ADD bagi pemberdayaan masyarakat sudah efektif walaupun tidak bisa dikatakan efektif secara keseluruhan. Terdapat dua hambatan utama yang sifatnya internal maupun eksternal. Yaitu, keterbatasan relasi dengan pihak ketiga dan keterlambatan pencairan dana dari kabupaten. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian di bawah ini :

1. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penulisan ini dilihat dari prosesnya, dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Tahapan perencanaan meliputi pengumpulan aspirasi warga untuk kemudian dimusyawarahkan dan selanjutnya dibuatkan skala prioritas. Selanjutnya rencana penggunaan dana tersebut akan dituangkan dalam ukuran keuangan, proses ini selanjutnya disebut sebagai tahapan penganggaran. Adanya penganggaran bertujuan sebagai kontrol atas penggunaan ADD. Proses

selanjutnya disebut sebagai proses penata usahaan yang meliputi mekanisme pencairan dan penyaluran ADD. Setiap dana ADD yang dipergunakan wajib dibuat laporan penggunaannya. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Pelaporan penggunaan dana terdiri dari laporan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan pencapaian hasil dari penggunaan ADD serta mencantumkan bukti pembiayaan berupa nota maupun kwitansi. Pelaporan ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban ADD. Pelaporan penggunaan dana harus sesuai dengan rencana penggunaan di awal penyusunan. Proses pengelolaan ADD yang terakhir adalah pengawasan, dimana pengawasan ini dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Ponorogo dan BPD. Pengawasan ini lebih bersifat membina proses pengelolaan ADD agar lebih hemat, terarah, terkendali, tepat sasaran dan transparan.

2. Efektivitas ADD pada penulisan ini juga dilihat dari bagaimana proses penggunaan dana ADD. Penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di desa Gupolo meliputi penggunaan dalam kegiatan, pembinaan PKK, pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa, dan pembinaan pelaksana kegiatan. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga pembangunan di desa Gupolo dapat berjalan dengan optimal.

Penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di desa Gupolo dinilai sudah cukup efektif. Hal ini dilihat dari seluruh kegiatan pemberdayaan yang

direncanakan pada musrembang dapat terselenggara secara penuh tanpa adanya satupun kegiatan yang macet maupun tidak terlaksana.

3. Terdapat beberapa faktor pendukung efektivitas ADD dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain yaitu adalah, partisipasi masyarakat, adanya petunjuk teknis pelaksanaan ADD, Kemampuan Sumber Daya Aparatur Desa Gupolo dan pembinaan inspektorat.

Sedangkan faktor penghambat yang ditemui adalah terkait keterbatasan relasi dan ketrelambatan waktu pencairan. ADD tahun anggaran 2017.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menilai efektivitas ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gupolo Kabupaten Ponorogo, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan ADD ini dengan lebih baik. Berikut beberapa saran dari penulis antara lain :

1. Untuk mengatasi dua hambatan utama yang terjadi dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di desa Gupolo maka pemerintah desa pertama haruslah menjalin relasi dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa, relasi yang dibangun dapat berupa perjanjian kerja atau kontrak resmi antara pemerintah desa dan pihak ketiga. Kedua pemerintah desa perlu mempertimbangkan untuk memberdayakan kas yang sifatnya sebagai dana cadangan untuk mengatasi masalah keterlambatan pencairan ADD.

2. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa Gupolo guna mensukseskan program pemberdayaan masyarakat maka pemerintah dan seluruh lembaga kemasyarakatan desa hendaknya lebih intensif untuk melakukan sosialisasi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kegiatan pemberdayaan apa saja yang didanainya melalui kegiatan kegiatan warga yang sifatnya non formal seperti pengajian, yasinan dan kegiatan seni budaya yang biasa diikuti oleh masyarakat secara masif.
3. Pemerintah desa Gupolo haruslah lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak akademisi khususnya yang berasal dari sumber daya dari masyarakatnya sendiri untuk melakukan penelitian guna mengatasi masalah yang ada di desa Gupolo, khususnya masalah kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya desa. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan kontribusi terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga dapat lebih sistematis dan tepat sasaran dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Agustin Amelyana,dkk.*Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*.jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Ma
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Pengajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Anonim. 2010. *Profil Desa Gupolo, Kecamatan Babadan*. Pemerintah Desa Gupolo.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*.Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Handayaniingrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV.Haji Masagung.
- HAW.Widjaja(2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat dan Utuh*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*,Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta
- Kertasasmita, Ginandjar. 1995.*Ekonomi Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta :CIDES
- Kementerian Keuangan, & Bappenas. (2009). *Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)*. Diambil 24 Mei 2016, dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku_2.pdf
- Mubyarto,1993. *Pancasila Economic System :Its's Faecture And Conceptual Basic* : Yogyakarta : Gadjah Mada Uuniversity Press
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa.. Fokusmedia*. Bandung

- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suryaningrat,Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Syamsudin,Sjamsiar.2010.*Dasar Dasar & teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN
- The Liang Gie. 1978. *Unsur Unsur Administrasi : Suatu Kumpulan Karanga Karya Kencana*. Yogyakarta
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengeleolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendagri No 37 tahun 2007 Tentang Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Ponorogo No 17 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan ADD

LAMPIRAN



OBSERVASI PENULIS



(DOKUMEN RPJM Desa & RKP Desa)



(BAPAK MUHAJIR SEKDES GUPOLO SELAKU NARASUMBER)

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**
KECAMATAN BABADAN
DESA GUPOLO
Jl.Kh.Abdul Hadi No.74.A Telp(0352) 463 183
GUPOLO

Nomor : 04/78/405.603.06/2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **UNDANGAN**

Gupolo, 27 Februari 2018
K e p a d a :
Yth.Bpk/Ibu/Sdr : **TITIK KUDORI**
Di : **GUPOLO**

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bpk/Ibu/Sdr
besuk pada :

Hari : **RABU**
Tanggal : **28 Februari 2018**
Waktu/jam : **19.30 .WIB.**
Tempat : **Balai Desa Gupolo Jl.KH.Abdul Hadi No.74.A**
Keperluan : **Pengesahan RAPBDes Thn Anggaran 2018.**
Catatan : **Mohon Hadir tepat waktu**

Demikian undangan ini kami buat atas kehadirannya
disampaikan banyak-banyak terima kasih.

Kepala Desa Gupolo

BASUKI ROMDON S.Ag

(CONTOH UNDANGAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMBAHAS
ANGGARAN DESA)



(BALAI DESA GUPOLO TAMPAK DEPAN)



(SUASANA PERTEMUAN IBU IBU BAGIAN DARI KEGIATAN
PEMBINAAN PKK)

